

**ANALISIS PENDAPATAN MASYARAKAT PADA KAWASAN HUTAN  
LINDUNG DI DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA  
KABUPATEN BARRU**

**YOUMIL ALFUADI AGNUR  
105951100920**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2025**

**ANALISIS PENDAPATAN MASYARAKAT PADA KAWASAN HUTAN  
LINDUNG DI DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA  
KABUPATEN BARRU**

**YOUMIL ALFUADI AGNUR  
105951100920**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pendapatan Masyarakat Pada Kawasan Hutan Lindung  
Di Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Nama : Youmil Alfuadi Agnur

Nim : 105951100920


Program Studi: Kehutanan


Fakultas : Pertanian

Disetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Ir. Muthmainnah, S.Hut., M.Hut., IPM.  
NIDN. 0920018801

  
Rahmat Ariandi, S.Hut., M.Hut.  
NIDN. 0908048802

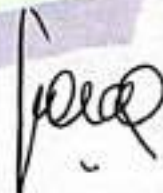
Diketahui

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi Kehutanan



Dr. Ir. Andi Khaerivah, M.Pd., IPU  
NIDN. 0926036803



Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.  
NIDN. 0011077101



## HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Analisis Pendapatan Masyarakat Pada Kawasan Hutan Lindung Di  
Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru  
Nama : Youmil Alfuadi Agnur  
Nim : 105951100920  
Program Studi : Kehutanan  
Fakultas : Pertanian


### KOMISI PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Pembimbing I

Ir. Muthmainnah, S.Hut., M.Hut., IPM.  
NIDN.0920018801

()

Pembimbing II

Rahmat Ariandi, S.Hut., M.Hut.  
NIDN. d08048802

()

Penguji I

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM  
NIDN. 0907028202

()

Penguji II

Andi Aziz Abdullah., S. Hut., M.p  
NIDN. 0930106701

()

Tanggal Lulus : 12 Juli 2025

## PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Analisis Pendapatan Masyarakat Pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru* adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan manapun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Makassar, Juli 2025

**Youmil Alfuadi Agnur**  
**105951100920**

## ABSTRAK

**Youmil Alfuadi Agnur. 105951100920.** Analisis Pendapatan Masyarakat Pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Di Bimbing oleh Ir. Muthmainnah, S.Hut., M.Hut., IPM dan Rahmat Ariandi, S.Hut., M.Hut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan masyarakat di Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Januari 2025 hingga 21 Maret 2025.

Metode yang digunakan adalah probabilitas sampel dan teknik sampling jenuh dengan jumlah responden sebanyak 15 orang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pendapatan masyarakat pengelola Hutan Desa yang mengelola kemiri sebanyak Rp.98.251.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp. 7.557.769/tahun, lalu pendapatan aren sebanyak Rp 11.876.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp.2.969.000/tahun, sedangkan pendapatan pengelola madu sebanyak Rp.48.750.000/tahun dengan rata-rata pendapatan Rp. 6.093.750/tahun. Total pendapatan dari kemiri, aren dan madu sebanyak Rp. 158.877.000 /tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp.16.620.519 /tahun.

**Kata kunci :** *Analisis Pendapatan, Hutan Desa, Lembaga Desa Pengelola Hutan, Pendapatan Kemiri, Pendapatan Madu, Pendapatan Aren.*

## **ABSTRACK**

***Youmil Alfuadi Agnur. 105951100920. Analysis of Community Income in Protected Forest Areas in Paccekke Village, Soppeng Riaja District, Barru Regency, Guided by Ir. Muthmainnah, S.Hut., M.Hut., IPM and Rahmat Ariandi, S.Hut., M.Hut.***

*This study aims to determine the income of the community at the Paccekke Village Forest Management Institution, Soppeng Riaja District, Barru Regency. This study was conducted from January 30, 2025, to March 21, 2025.*

*The methods used were probability sampling and saturated sampling techniques, with 15 respondents.*

*Based on the results, it can be seen that the income of the community managing the Village Forest, which manages candlenut, is IDR 98,251,000/year, with an average income of IDR 1,000,000/year. 7,557,769/year, while palm sugar income is Rp 11,876,000/year, with an average income of Rp 2,969,000/year. Honey managers earn Rp 48,750,000/year, with an average income of Rp 6,093,750/year. Total income from candlenut, palm sugar, and honey is Rp 158,877,000/year, with an average income of Rp 16,620,519/year.*

***Keywords:*** *Income Analysis, Village Forest, Village Forest Management Institution, Candlenut Income, Honey Income, Palm Sugar Income*



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan judul “Analisis Pendapatan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Hutan Desa Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru ”.

Tidak lupa pula kita kirimkan Salam dan Shalawat kepada junjungan kita Baginda Rasulullah kepada nabi Muhammad SAW., beliau yang menjadi surih tauladan bagi kita ummat beragama. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya orang-orang yang memberimasukan, bimbingan, dan semangat, untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk dukungan dan keberhasilan penulis.
2. Dr. Andi Khaeriyah, M.Pd., IPU. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM. Selaku Ketua Prodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan masukan kepada penulis.
4. Ir. Muthmainnah, S.Hut., M.Hut., IPM. Selaku Pembimbing I Dan Rahmat Ariandi, S.Hut.,M.Hut. Selaku pembimbing II yang telah memberikan



masukan, bimbingan dan motivasinya dalam proses penulisan proposal penelitian ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh Pendidikan
6. Teman-teman Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2020.
7. Untuk wanita yang paling cantik, baik, dan pengertian di bumi ini, Putri Kartika Ayu, yang selalu menemani sang penulis dalam keadaan apa pun.

Dalam penyusunan proposal ini tentu masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk mencapai hasil yang maksimal.

Makassar,

Agustus 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumus Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Perhutanan Sosial.....	6
2.2 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) .....	10
2.3 Hutan Desa .....	11
2.4 Pendapatan .....	14
2.5 Kerangka Pikir .....	19
III. METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Waktu serta Tempat .....	20
3.2 Jenis Data .....	20
3.3 Populasi dan Sampel .....	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	21
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	24
4.2 Identitas Responden .....	25
4.3 Analisis Potensi Komoditi HHBK di LPHD Desa Paccekke.....	31

4.4	Analisis Pendapatan HHBK Kemiri di LPHD Desa Paccekke.....	32
4.5	Analisis Pendapatan HHBK Aren di LPHD Desa Paccekke .....	36
4.6	Analisis Pendapatan HHBK Madu di LPHD Desa Paccekke.....	41
4.7	Analisis Pendapatan HHBK di LPHD Desa Paccekke .....	45
4.8	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan.....	48
V. KESIMPULAN .....		51
5.1	Kesimpulan .....	51
5.2	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA .....		54
LAMPIRAN.....		60



## DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Umur Responden .....	25
2.	Jenis Kelamin Responden.....	28
3.	Tingkat Pendidikan Responden .....	29
4.	Status Keanggotaan Responden.....	30
5.	Identifikasi Potensi Komoditi .....	31
6.	Pendapatan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Desa Paccekke .....	32
7.	Pendapatan Masyarakat Pengelola Aren di LPHD Desa Paccekke.....	36
8.	Pendapatan Masyarakat Pengelola Madu di LPHD Desa Paccekke .....	41
9.	Total Pendapatan HHBK LPHD Desa Paccekke.....	45
10.	Data Identitas Responden LPHD Desa paccekke.....	64
11.	Penerimaan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Desa Paccekke Pada Panen 1 ..	64
12.	Penerimaan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Desa Paccekke Pada Panen 2 ..	65
13.	Pengeluaran Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Desa Paccekke .....	65
14.	Penerimaan Masyarakat Pengelola Aren di LPHD Desa Paccekke Pada Panen 1 .....	67
15.	Penerimaan Masyarakat Pengelola Aren di LPHD Desa Paccekke Pada Panen 2 .....	68
16.	Penerimaan Masyarakat Pengelola Aren di LPHD Desa Paccekke Pada Panen 3 .....	68
17.	Pengeluaran Masyarakat Pengelola Aren di LPHD Desa Paccekke .....	69
18.	Penerimaan Masyarakat Pengelola Madu di LPHD Desa Paccekke Pada panen 1 .....	71
19.	Penerimaan Masyarakat Pengelola Madu di LPHD Desa Paccekke Pada panen 2 .....	71
20.	Penerimaan Masyarakat Pengelola Madu di LPHD Desa Paccekke Pada panen 3 .....	72
21.	Pengeluaran Masyarakat Pengelola Madu di LPHD Desa Paccekke .....	73



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	<i>Teks</i>	Halaman
1.	Kerangka Pikir .....	19
2.	Peta Desa Paccekke.....	24
3.	Total dan Rata Rata Pendapatan HHBK LPHD Desa Paccekke Pertahun .....	46
4.	Wawancara Responden .....	75
5.	Wawancara Responden .....	75
6.	Wawancara Responden .....	76
7.	Wawancara Responden.....	76
8.	Wawancara Responden.....	77



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	<i>Teks</i>	Halaman
1	Kuesioner .....	61
2	Tabulasi Data Hasil Penelitian .....	64
3	Dokumentasi .....	75
4	SK LPHD Desa Paccekke .....	78
5	Surat Izin Penelitian .....	87
6	Surat Rekomendasi Penelitian.....	88
7	Surat Keterangan Bebas Plagiat .....	90
8	Hasil Turnitin .....	91



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perhutanan sosial di Indonesia diatur dalam berbagai bentuk yang dirancang untuk memberikan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, di antaranya yakni Hutan Adat, Kemitraan Hutan atau KK, Hutan Kemasyarakatan atau HKm, Hutan Desa atau HD serta Hutan Tanaman Rakyat atau HTR yang diatur oleh Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial). Hutan Desa memberikan hak kelola pada masyarakat desa untuk mengelola hutan yang berada di sekitar wilayah desa, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa dan menjaga kelestarian hutan (KLHK, 2016).

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Ajatappareng merupakan bagian dari unit II KPH di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini secara resmi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tertanggal 28 November 2017, yang menetapkan areal pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di wilayah Sulawesi Selatan seluas kurang lebih 69.848 hektare. Salah satu bentuk implementasi skema Perhutanan Sosial di bawah pengelolaan KPHL Ajatappareng adalah Hutan Desa Paccekke, yang mencakup area seluas sekitar 102 hektare dan terletak di kawasan hutan lindung Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan, Hutan Desa merupakan kawasan hutan yang belum memiliki izin pemanfaatan dan dikelola oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam implementasinya,

pengelolaan Hutan Desa dilakukan oleh suatu badan khusus bernama Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), yang berada di bawah koordinasi langsung Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Paccekke diberikan pada tahun 2017 (pengajuan tahun 2014) dengan SK Menteri LHK Nomor: SK.3495/Menlhk.PSKL/PPKPS/PSL.0/6/2017. Penghasilan masyarakat bersumber dari pengelolaan HHBK yakni pengelolaan Aren. Melihat rentang waktu pengajuan hingga dikeluarkannya SK LPHD di Desa Paccekke ini, dapat mencerminkan bagaimana bersikerasnya masyarakat untuk mendapatkan wadah ini di Desa Paccekke.

Adanya LPHD yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk aren, membuka peluang baru bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi dan pendapatan mereka. Namun, tanpa pemahaman yang jelas mengenai pendapatan petani aren saat ini, sulit untuk mengukur dampak dari kebijakan pengelolaan hutan yang akan diterapkan oleh LPHD. Maka dari itu, penelitian ini menjadi sangat relevan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan petani aren.

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan sektor pertanian melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pembangunan pertanian, di mana pemenuhan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan nasional diupayakan semaksimal mungkin dari hasil produksi dalam negeri. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah besaran pendapatan yang mereka peroleh. Pendapatan menjadi faktor utama



seseorang dalam mengalokasikan pengeluarannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi (Armalia, 2018). Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Sufriadi, 2018).

Kondisi pendapatan petani aren di HD Paccekke saat ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan, yang disebabkan oleh beberapa faktor struktural dan kebijakan yang belum optimal. Menurut data dari Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) setempat, meskipun aren memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai komoditas unggulan, pendapatan petani di wilayah tersebut masih jauh dari harapan. Sebagian besar petani hanya memperoleh pendapatan yang bergantung pada hasil budidaya aren dalam skala kecil, dengan proses pengolahan yang masih sederhana dan terbatasnya akses ke pasar yang lebih luas.

Penelitian oleh Haryanto (2020) mengungkapkan bahwa sebagian besar petani aren di daerah seperti HD Paccekke menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pendapatan, di antaranya adalah rendahnya produktivitas tanaman, minimnya keterampilan dalam pengolahan hasil, serta kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi pasar. Hal ini berkontribusi pada ketimpangan antara petani yang mampu mengakses fasilitas pengolahan lebih modern dan mereka yang masih bergantung pada cara-cara tradisional. Bahkan, dalam laporan KPH, ditemukan bahwa sekitar 60% petani aren di HD Paccekke masih mengandalkan cara tradisional dalam pengolahan nira, yang menghasilkan pendapatan yang tidak optimal dibandingkan dengan mereka yang menggunakan teknologi modern.

Melalui analisis pendapatan, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh langsung perhutanan social terhadap ekonomi masyarakat. Data yang berbasis pada pendapatan akan lebih mudah dipahami oleh berbagai pihak dan dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan yang lebih baik. Di sisi lain, analisis semacam ini dapat menunjukkan ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang tergabung dalam lembaga pengelola hutan dan mereka yang tidak tergabung, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan tingkat keberhasilan program (Forest Watch Indonesia, 2019).

Selain itu, salah satu faktor yang mendasari pentingnya penelitian ini adalah baru saja diresmikannya Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang telah lama diusulkan. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya komoditas aren yang menjadi andalan ekonomi masyarakat setempat. Namun, meskipun keberadaan LPHD memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan aren secara lebih terstruktur, belum ada data yang memadai mengenai bagaimana hal ini berpengaruh terhadap pendapatan petani.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pendapatan Masyarakat Pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru”**. Dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja LPHD dalam menghasilkan pendapatan terhadap masyarakat local serta keberlanjutan pengelolaan hutan. Dengan fokus pada pendapatan, penelitian ini dapat membandingkan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam perhutanan social dengan pendapatan mereka sebelum bergabung dalam program tersebut. Ini akan

memberikan pemahaman tentang apakah pengelolaan hutan berbasis masyarakat benar-benar mengarah pada peningkatan pendapatan atau justru menambah beban ekonomi mereka (FAO, 2019).

### **1.2 Rumus Masalah**

Rumusan masalah terhadap penelitian ini yakni berapa besar pendapatan yang dihasilkan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) bagi masyarakat di Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, kabupaten Barru.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi pendapatan yang diperoleh melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) terhadap masyarakat di Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menginformasikan besaran pendapatan yang dihasilkan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di wilayah Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
- b. Memberikan acuan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam memahami potensi pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan riset dasar pemerintah dalam menilai dan mengevaluasi kebijakan terkait usaha tani yang ada dan dampaknya terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang tergabung dalam LPHD.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang diterapkan baik di kawasan hutan negara maupun hutan hak/hutan adat, dengan melibatkan masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat sebagai aktor utama. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung dinamika sosial dan budaya. Skema perhutanan sosial ini mencakup bentuk-bentuk seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021).

Dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan hutan, perhutanan sosial dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan serta mengatasi dampak negatif dari aktivitas masyarakat lokal di hutan (Kumar 2015). Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab deforestasi adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan di sekitar hutan. Konsep perhutanan sosial muncul sebagai hasil dari masalah ini (Laksemi et al., 2019).

Kebijakan perhutanan sosial telah mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, sejak menjadi program nasional pada tahun 2014. Sebagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dengan memberikan pengelolaan kawasan hutan kepada penduduk yang tinggal di dalam



dan sekitar hutan, perhutanan sosial sekarang menjadi salah satu kebijakan strategis di bidang kehutanan (Supriyanto, H., Roni, J., dan Bayu S., 2017).

Sebagian besar areal untuk pengembangan program perhutanan sosial berada di hutan lindung (Suharti et al., 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan cenderung terbatas pada hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan. Oleh karena itu, pemilihan komoditas yang akan dikembangkan perlu disesuaikan dengan potensi spesifik dari masing-masing wilayah, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda (Faharuddin, 2012). Keberhasilan implementasi program perhutanan sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan (Dewi, 2018).

Perhutanan sosial di Indonesia mengacu pada pengelolaan hutan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan memelihara kelestarian hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, terdapat beberapa skema perhutanan sosial yang diatur adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (KK). Menurut Suyanto et al. (2022), kebijakan perhutanan sosial bertujuan untuk mengurangi deforestasi dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, yang juga berfungsi untuk menciptakan sinergi antara tujuan konservasi dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Puspa et al. (2023) mengemukakan bahwa perhutanan sosial berperan penting dalam peralihan dari model pengelolaan hutan yang sentralistik dan top-down menuju model yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat. Hal ini mendukung agenda besar pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Berikut penjabaran beberapa skema utama dalam perhutanan sosial di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, meliputi:

1. Hutan Desa (HD)

Hutan Desa adalah skema yang memberikan hak helola negara yang berada di wilayah administrasi desa kepada masyarakat desa. Tujuan utama dari Hutan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penelitian oleh Titi (2022) menunjukkan bahwa Hutan Desa dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Namun, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kapasitas desa untuk mengelola hutan dan akses terhadap pasar hasil hutan.

2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan memberikan hak kelola atas hutan negara kepada masyarakat untuk pengelolaan yang berbasis pada keberlanjutan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta konservasi hutan. Skema ini biasanya diterapkan pada kawasan hutan negara yang tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi. Menurut Suyanto et al. (2021), Hutan Kemasyarakatan mampu memberikan dampak positif pada perekonomian

masyarakat, namun sering kali mengalami kendala dalam hal perizinan dan pengawasan. Keberlanjutan dari program ini sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah dan sektor swasta dalam memberikan pelatihan dan akses pasar bagi hasil hutan.

### 3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan Tanaman Rakyat adalah skema yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara intensif dengan menanam pohon jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti sengon, jati, atau mahoni, pada lahan yang dikelola secara pribadi atau kelompok. HTR memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam jangka waktu tertentu, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. HTR dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi masyarakat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal akses permodalan dan pengolahan hasil hutan yang efisien. HTR juga berperan dalam meningkatkan ketahanan ekosistem lokal melalui pengelolaan yang berkelanjutan Kusumawati (2022).

### 4. Kemitraan Kehutanan (KK)

Kemitraan Kehutanan adalah skema yang melibatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam pengelolaan hutan, dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang adil bagi semua pihak sambil menjaga kelestarian lingkungan. Kemitraan ini dapat mencakup berbagai bentuk kerjasama, termasuk dalam hal pengelolaan hasil hutan, ekowisata, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Kemitraan kehutanan sering kali menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat lokal, namun kesuksesan skema ini sangat bergantung pada

transparansi, peran pemerintah yang kuat, dan kesepakatan yang jelas antara semua pihak yang terlibat Pratiwi et al. (2022)

## 5. Hutan Adat

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat juga merupakan salah satu skema dalam program perhutanan sosial yang memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat hukum adat berdasarkan kearifan lokal dan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2018), hutan adat merupakan mekanisme pengelolaan hutan yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengelola hutan serta sumber daya alam sekitarnya sesuai dengan pengetahuan tradisional mereka.

Dengan demikian, skema perhutanan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial berperan penting dalam menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan skema ini membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

### 2.2 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)

Program pengembangan hutan desa merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan hutan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan (Abidin et al., 2016). Lembaga Pengelola Hutan Desa



(LPHD) berperan sebagai sarana bagi masyarakat dalam menerapkan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab atas pelestarian hutan tersebut. Keberadaan LPHD dipandang sebagai elemen penting dalam menjaga fungsi ekologis hutan serta berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar (Qurniati et al., 2017).

Masyarakat setempat memutuskan untuk membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan desa yang berkelanjutan. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk menjadi lembaga masyarakat yang fokus pada konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan pengelola hutan desa menjadi kendala utama dalam pengembangan objek wisata alam. Untuk mencapai peningkatan yang optimal, konsep pendidikan dan pelatihan yang baik diperlukan untuk kemampuan setiap individu dalam satu kelompok (Nugraha, 2020).

Pengelola hutan desa berperan penting dalam menjaga kelestarian alam karena mereka secara alami akan membantu tersedianya layanan ekosistem dari berbagai aktivitas yang berpotensi menyebabkan bencana (Parthama, 2019) dan mencegah eksploitasi sumber daya alam melalui masyarakat perhutani sosial (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014).

### **2.3 Hutan Desa**

Hutan desa eksis secara sosiologis, baik yang berada di dalam kawasan hutan (hutan negara) maupun di luar kawasan (hutan hak/rakyat). Tanah kas desa, juga dikenal sebagai "tanah bengkok" di Jawa, telah kehilangan fungsinya sejak

negara menerapkan tata ruang kawasan hutan. Metode tradisional masyarakat untuk membangun hutan telah berkembang dari desa ke pemerintahan.

Menurut PP RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan bahwa hutan desa adalah kawasan hutan tanpa izin yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Akses diberikan berdasarkan Permenhut No. P.9/Menhut-II/2021, , yaitu ketika Menteri Kehutanan atau Pemerintah Daerah secara permanen memberikan wewenang pengelolaan hutan desa kepada lembaga desa untuk jangka waktu 35 tahun, dengan opsi perpanjangan. Program hutan desa harus dilaksanakan sesuai dengan dua prinsip utama: 1) tidak mengubah status dan fungsi hutan; dan 2) memiliki hubungan masyarakat dengan sumber daya hutan. Karena hutan desa memiliki aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis yang saling terkait, pengelolaan yang berfokus pada ekonomi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain ini. Kerugian hutan dapat terjadi jika prinsip-prinsip ini tidak dipahami dengan baik, yang akan berdampak negatif pada semua aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Menteri Kehutanan menetapkan area kerjahutan desa setelah usulan dari bupati atau walikota. Hutan desa, baik hutan produksi maupun hutan lindung, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan, seperti budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak.

Pengelolaan hutan secara professional adalah langkah bijak dalam memperdayakan masyarakat desa hutan sebagai pengelolaan langsung ditingkat lapangan. Untuk menciptakan keteraturan dan keadilan social dalam pengelolaan hutan desa, BUMDes telah menata dalam peraturan desa yang mengatur pengelolaan Hutan Desa, terdapat beberapa ketentuan penting, antara lain:

- a. Pengelolaan hutan desa wajib mengacu pada dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Desa yang telah ditetapkan.
- b. Perubahan status dan fungsi kawasan hutan desa tidak diperbolehkan.
- c. Masyarakat dilarang mengalihkan hak pengelolaan lahan, termasuk menjaminkan atau menggadaikannya.
- d. Penebangan pohon secara sembarangan tidak diizinkan.
- e. Kegiatan yang dapat membahayakan pohon, seperti menggerek batang hingga menyebabkan kematian pohon, dilarang kecuali untuk jenis pohon yang memang diambil hasilnya, seperti pohon karet, nangka, atau kayu tanning.
- f. Pengambilan pohon yang telah tumbang juga tidak diperbolehkan.
- g. Praktik pembakaran semak atau rumput untuk membuka atau memperluas lahan dilarang.
- h. Pengambilan hasil hutan dari luar lahan kelola, seperti bambu, rotan, madu, jamur, atau tanaman hias, hanya dapat dilakukan dengan izin dari petani pengelolanya.
- i. Penggembalaan ternak di luar area kelola juga tidak diperbolehkan tanpa seizin pemilik lahan yang bersangkutan.

Peraturan desa juga menetapkan sanksi bagi rumah tangga petani pengelola hutan, seperti berikut: peringatan lisan atau tertulis akan diberikan kepada petani pengelola hutan desa jika mereka tidak memanfaatkan lahan yang mereka kelola dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kesepakatan pengelolaan hutan desa antara petani dan BUMDes dibuat. Jika petani gagal mematuhi peringatan ini tiga kali, perjanjian kesepakatan pengelolaan hutan desa antara petani dan BUM

Selain itu, hal yang perlu digaris bawahi yakni keberadaan hutan desa juga memberikan beberapa manfaat, antara lain: sebagai penyerap karbon, menjaga keanekaragaman hayati, mencegah erosi dan menjaga tata air serta menghasilkan berbagai jenis hasil hutan bukan kayu yang dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan dengan membantu perekonomian masyarakat sekitarnya. Maka dari itu, LPHD berkaitan dengan hutan desa yakni LPHD memiliki fungsi utama sebagai badan yang bertanggungjawab dalam mengelola hutan desa. Manfaat dari LPHD melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan berbagai keuntungan social dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

## **2.4 Pendapatan**

Kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas pada jumlah; namun, pendapatan seseorang membatasi keduanya. Karena berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan, pendapatan masyarakat bervariasi antara individu. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja memengaruhi jenis pekerjaan ini. Salah satu cara untuk mengukur indikator kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat

berapa banyak uang yang mereka peroleh. Peningkatan pendapatan per kapita dapat menunjukkan peningkatan taraf hidup masyarakat, tetapi taraf hidup itu sendiri tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi, yang mencakup hal-hal seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, yang semua penting untuk menjaga taraf hidup yang wajar.

Jhingan (2014) mendefinisikan pendapatan sebagai suatu penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Menurutnya, pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan yang menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan, di mana pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan. Sebagai organisasi yang berorientasi pada profit, pendapatan memiliki peranan yang sangat penting. Pendapatan sangat penting untuk operasi bisnis karena akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan dan jangka panjangnya (Lestari, 2021).

Menurut Muria (2018), pendapatan adalah uang yang dihasilkan dari operasi bisnis sehari-hari. Ini dapat didefinisikan dengan berbagai kata, seperti penjualan (sales), pendapatan manufaktur (fees), pendapatan bunga (interest), pendapatan dividen (dividend), pendapatan royalti (royalty), dan pendapatan sewa (rent).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), pendapatan adalah keuntungan yang dihasilkan dari melakukan aktivitas entitas yang biasa.



Pendapatan dapat disebut dengan berbagai nama, seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Pendapatan, menurut Sohib (2018), adalah aliran masuk aktivitas yang berasal dari penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Bagi bisnis, pendapatan dari operasi pokok akan meningkatkan nilai aset dan modal. Untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal yang disebabkan oleh penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat secara terpisah dalam akun pendapatan.

Dalam ilmu ekonomi, pendapatan diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode tanpa mengubah kondisi awalnya. Definisi ini berfokus pada total pengeluaran untuk konsumsi selama periode tersebut. Dengan kata lain, pendapatan adalah total harta kekayaan pada awal periode ditambah semua hasil yang diperoleh selama periode itu, bukan hanya yang digunakan untuk konsumsi.

Pendapatan didefinisikan oleh Susanti (2021) ialah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Ini adalah komponen paling penting dalam bisnis karena dapat menentukan seberapa baik suatu bisnis berjalan. Akibatnya, perusahaan harus melakukan segala upaya yang mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkannya. Pada dasarnya, pendapatan diperoleh dari penjualan barang atau jasa yang ditawarkan. Pendapatan, menurut ilmu ekonomi, adalah nilai maksimum yang dikonsumsi oleh

seseorang dalam suatu periode dengan asumsi keadaannya sama pada akhir periode keadaan semula. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah ke seluruh hasil yang diperoleh selama periode tersebut, bukan hanya yang dikonsumsi.

Pendapatan sangat penting bagi setiap orang di dunia ini, dan sangat berpengaruh pada kehidupan bisnis secara keseluruhan (Pramelia & Erawati, 2022). Kemampuan suatu usaha sangat memengaruhi seberapa besar pendapatan yang diperoleh oleh usaha tersebut. Pendapatan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hasil kerja, seperti usaha. Namun, dalam istilah manajemen, pendapatan adalah uang yang diterima oleh individu, perusahaan, dan lembaga lain dalam bentuk gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba (Harto et al., 2019).

Menurut Sadiyah (2019), pendapatan individu dibagi menjadi dua kategori: pendapatan asli dan pendapatan turunan. Pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima oleh individu yang berpartisipasi secara langsung dalam proses produksi produk, sedangkan pendapatan turunan adalah pendapatan yang diterima oleh kelompok orang lain yang berpartisipasi secara tidak langsung dalam proses produksi.

Menurut Arianti (2020), salah satu komponen pendapatan yang dimaksud adalah sumber dari pendapatan tersebut, dimana komponen tersebut sebagai berikut :

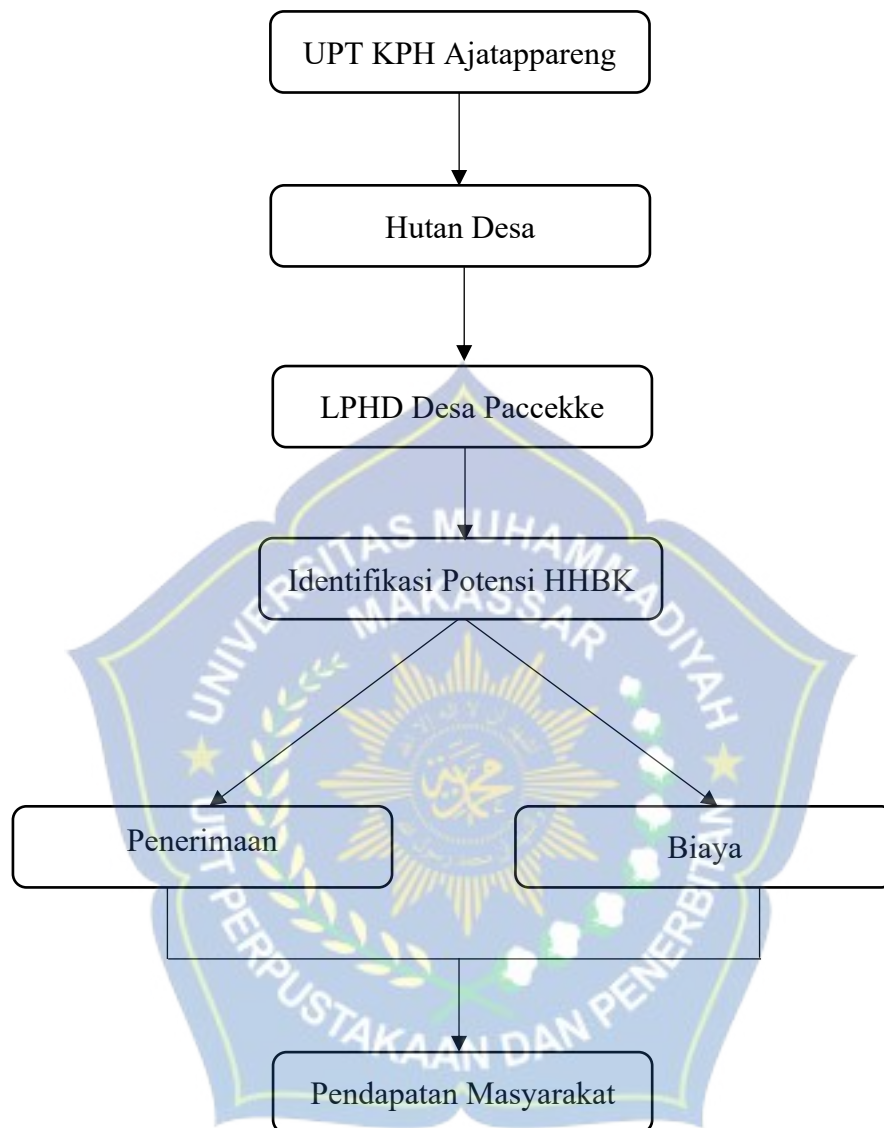
1. Pendapatan hasil produksi barang atau jasa.

2. Imbalan yang diterima karena orang lain menggunakan aktivas sumber ekonomi perusahaan.
3. Penjualan aktivas selain barang dagangan merupakan komponen pendapatan tambahan perusahaan.

Menurut Maulana (2018), ada beberapa hal yang memengaruhi pendapatan, seperti berikut:

1. Produk; salah satu tugas utama manajemen penjualan adalah desa inproduk, yang memberikan saran perbaikan untuk desa inproduk berdasarkan keluhan pelanggan.
2. Harga, jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk mendapatkan suatu produk berdasarkan keluhan pelanggan. 3
3. Distribusi, proses di mana barang dikirim dari produsen ke konsumen.
4. Promosi, di mana perusahaan melakukan promosi dengan tujuan utama memberikan informasi, persuasi, dan insentif kepada pelanggan untuk memilih program yang ditawarkan perusahaan.

## 2.5 Kerangka Pikir



**Gambar. 1** Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu serta Tempat**

Akan dilaksanakan pada jangka waktu 30 Januari hingga 21 Maret 2025, pada kawasan Hutan Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja. Kabupaten Barru.

#### **3.2 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yang berasal dari wawancara dan kuisioner yang diberikan kepada setiap peserta untuk mengetahui pendapatan pengelolaan HHBK anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).
2. Data Sekunder, yang berasal dari Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), yang mencakup data tentang penerimaan dan biaya pengelolaan HHBK anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Dalam penentuan sampel akan menggunakan penentuan sesuai yang dijelaskan Sugiyono (2014). Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Populasi terdiri dari himpunan objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sebelum membuat kesimpulan. Pada LPHD Desa Paccekke terdapat populasi sejumlah 17 orang anggota. Maka, populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh anggota LPHD Desa Paccekke yakni 17 orang.



Untuk sampel, menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel tersebut sebagai perwakilan, harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Menurut Arikunto (2016), sampel diambil secara keseluruhan jika populasinya kurang dari 100 orang; namun, jika populasinya lebih dari 100 orang, dapat diambil 10%–15% atau 20%–25% dari populasinya.

Penulis menggunakan metode probabilitas sampel dan teknik sampling jenuh dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016: 84), probabilitas sampel adalah metode pengambilan sampel yang memberi kesempatan atau peluang yang sama untuk setiap elemen atau anggota populasi untuk menjadi sampel. Pada penelitian ini, sampel diambil dari 15 anggota populasi sasaran. Hal ini dikarenakan pindah domisili 2 anggota.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Wawancara**

Dalam penelitian, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari subjek secara langsung atau bertatap muka. Wawancara dilakukan oleh dua orang: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Data yang akan diungkapkan melalui metode wawancara ini harus benar-benar valid untuk penelitian.

#### **3.4.2 Kuesioner**

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.

### 3.4.3 Observasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi melibatkan pengamatan langsung objek yang akan diteliti.

### 3.4.4 Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis kuantitatif untuk menganalisis data. Analisis kuantitatif juga didefinisikan sebagai penelitian yang banyak menggunakan angka sejak pengumpulan data, penafsirannya, dan penampilan hasilnya.

Dalam analisis data penelitian ini, rumus berikut digunakan untuk menghitung pendapatan masyarakat pengelola LPHD

#### 1. Penerimaan

Jumlah penerimaan usaha tani dapat dihitung dengan melakukan analisis yang diusulkan oleh Soekartawi (2003), seperti berikut:

$$TR = P \cdot Q$$

Ket:

TR = Total penerimaan

P = Harga

Q = Total produksi

#### 2. Biaya

Merupakan biaya total yang dikeluarkan yakni sebagai berikut:

$$TC = TFC + TVC$$

Ket :

TC = Biaya Total

TFC = Total Biaya Tetap

TVC = Total Biaya Variabel

### 3. Pendapatan

Menurut Suratiyah (2006), pendapatan adalah selisih antara total penerimaan (total revenue) dengan total biaya (total cost). Pendapatan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$I = TR - TC$$

Keterangan:

I = pendapatan/income

TR = total penerimaan/total revenue

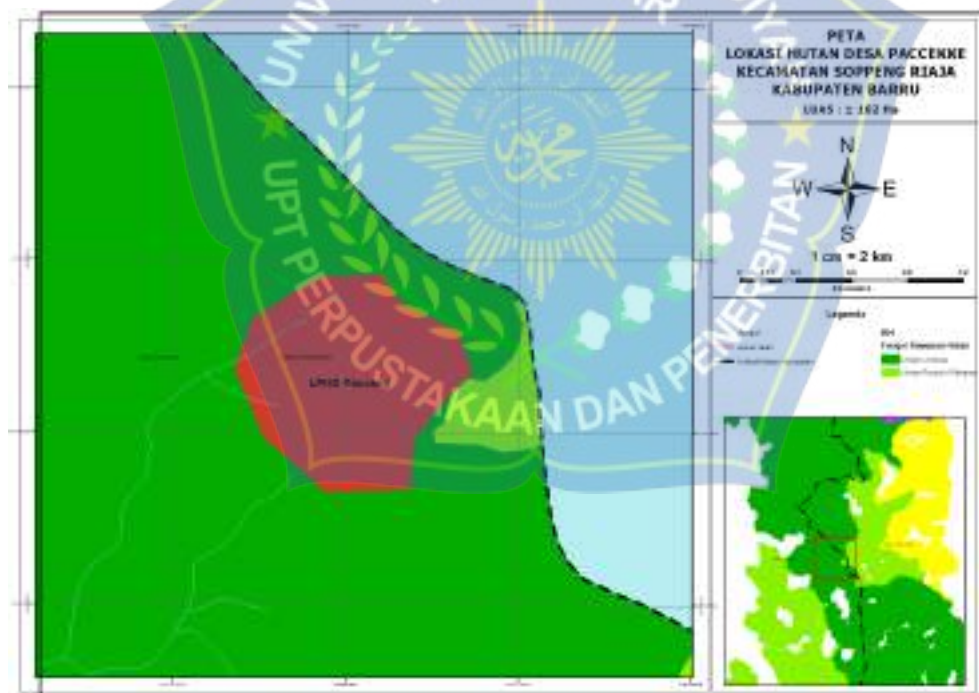
TC = total biaya/total cost



## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Desa Paccekke terletak di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, desa ini berada di dataran tinggi pegunungan dengan ketinggian sekitar 350 meter di atas permukaan laut, memberikan suasana sejuk dan pemandangan alam yang indah. Desa Paccekke terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Paccekke dan Dusun Kading, dengan jumlah penduduk sekitar 874 jiwa. Luas wilayah desa ini mencapai 2.455 hektar, dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, peternak, dan pekebun.



*Gambar 2 Peta Lokasi Hutan Desa Paccekke*

Secara administratif, desa ini berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kelurahan Kiru-Kiru
- b. Sebelah Timur: Desa Ajakkang
- c. Sebelah Selatan: Desa Balusu
- d. Sebelah Barat: Selat Makassar.

Batas-batas wilayah ini menjadikan Desa Paccekke sebagai salah satu desa yang strategis di Kecamatan Soppeng Riaja, dengan akses ke berbagai wilayah penting di sekitarnya.

#### 4.2 Identitas Responden

Identitas dari responden merupakan suatu kondisi yang menggambarkan keadaan responden atau wilayah setempat secara keseluruhan. Identitas dari responden yang akan dikali dalam penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, Pendidikan terakhir dan status dalam LPHD.

##### 1. Umur responden

Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun mati (Rudimin et al., 2017).

Klasifikasi berdasarkan umur responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1 Umur Responden**

No.	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase(%)
1.	31-40 tahun	3	20
2.	41-50 tahun	4	26,66
3.	51-60 tahun	8	53,33
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Primer Setelah Diolah Tahun 2025*



Tabel 1 menunjukkan persentase umur responden terbesar berada pada selang umur 51-60 tahun sebesar 53.33%. Sedangkan umur responden terkecil berada pada selang umur 31-40 tahun yakni sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa anggota aktif pada LPHD Desa Paccekke rata-rata adalah lanjut usia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota aktif LPHD Desa Paccekke berada pada rentang usia 51–60 tahun (53,33%), sedangkan kelompok usia termuda (31–40 tahun) hanya sebesar 20%. Temuan ini mencerminkan bahwa kegiatan dalam lembaga, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), masih didominasi oleh kelompok usia lanjut. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas kerja dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Sebagai contoh, laporan dari LPHD Lauk Bersatu di Desa Nanga Lauk menunjukkan bahwa pengurus LPHD didominasi oleh kaum muda, yang menjadi nilai lebih dalam pengelolaan hutan desa dengan mengoptimalkan teknologi dan inovasi (PRCF Indonesia, 2023).

Dalam sebuah konteks produktivitas, kelompok usia lanjut memang memiliki keunggulan dari sisi pengalaman dan pengetahuan lokal, namun dari sisi fisik dan adaptasi terhadap inovasi, mereka cenderung mengalami penurunan. Ini berpotensi memengaruhi efektivitas kerja, terutama dalam aktivitas lapangan yang membutuhkan tenaga dan ketahanan fisik. Selain itu, kurangnya anggota dari kelompok usia produktif muda dapat menghambat regenerasi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan (Effendi et al., 2017)

Lebih jauh lagi, kondisi sosial di Desa Paccekke memperkuat tantangan tersebut. Saat ini, pemuda di daerah tersebut cenderung tidak memiliki mental atau

minat untuk melanjutkan usaha HHBK, yang oleh generasi sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian utama. Sebaliknya, banyak dari mereka memilih melanjutkan pendidikan ke kota besar dan mengejar pekerjaan sebagai pegawai atau profesi non-agraris lainnya. Fenomena ini mencerminkan tren umum di berbagai desa di Indonesia, di mana generasi muda cenderung menjauh dari sektor agraris dan kehutanan karena keterbatasan akses terhadap modal, bimbingan, serta kurangnya daya tarik ekonomi (Mardani, 2024).

Indikasi ini juga menciptakan kesenjangan generasi dalam pengelolaan HHBK, di mana generasi tua masih terus menjalankan kegiatan produktif tanpa dukungan regenerasi yang memadai dari pemuda. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi ini dapat mengarah pada penurunan produktivitas jangka panjang dan bahkan ancaman terhadap keberlanjutan lembaga dan usaha HHBK itu sendiri. (Ahmad, 2024).

## **2. Jenis Kelamin**

Jenis kelamin adalah perbedaan biologis yang melekat pada manusia, seperti alat kelamin, kromosom, hormon, dan karakteristik fisik lainnya yang secara umum membedakan laki-laki dan perempuan. Biasanya, jenis kelamin ditentukan saat lahir berdasarkan pengamatan terhadap alat kelamin eksternal. Menurut WHO (*World Health Organization*), jenis kelamin (sex) merujuk pada “atribut biologis dan fisiologis yang menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan (WHO, 2011).

Klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2 Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	15	100
2.	Perempuan	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Primer Setelah Diolah Tahun 2025*

Tabel 2 menunjukkan persentase jenis kelamin responden 100% pada jenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa anggota pada LPHD Desa Paccekke keseluruhan adalah laki-laki. Selain itu juga menunjukkan bahwa struktur keanggotaan LPHD secara keseluruhan didominasi, bahkan dimonopoli, oleh laki-laki, tanpa keterlibatan perempuan. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan gender dalam akses dan partisipasi terhadap kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan, khususnya yang terkait dengan HHBK (Hafidah et al., 2023).

Mengacu pada konteks sosial-budaya lokal, pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan HHBK sering kali dipersepsikan sebagai ranah laki-laki, terutama jika menyangkut kegiatan fisik seperti pengambilan hasil hutan, pengolahan di lapangan, atau pengelolaan kelembagaan resmi seperti LPHD. Sebaliknya, perempuan sering kali hanya berperan dalam aktivitas domestik atau kegiatan HHBK yang berskala rumah tangga, seperti pengolahan hasil (misalnya makanan, kerajinan) tanpa diakui secara kelembagaan. (Hafidah et al., 2023).

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa perempuan belum diberikan ruang atau kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam, meskipun mereka juga memiliki pengetahuan dan peran penting dalam pengelolaan HHBK di tingkat rumah tangga atau komunitas. Ketidakhadiran mereka dalam struktur formal seperti LPHD dapat

membatasi potensi kolaborasi yang inklusif dan inovatif dalam pengelolaan sumber daya hutan (Manalu, et al, 2022)

### 3. Pendidikan Terakhir atau Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung sepanjang hayat dalam segala lingkungan dan situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap individu (Pristiwanti et al., 2022).

Klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3 Tingkat Pendidikan Responden**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SD	4	26,6
2.	SMP	5	33.3
3.	SMA	5	33.3
4.	Perguruan Tinggi	1	6.8
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer Setelah Diolah Tahun 2025*

Tabel 3 menunjukkan persentase tingkat pendidikan responden terbesar berada pada tingkat Pendidikan SD dan SMP sebesar 33.33%. Sedangkan tingkat pendidikan terkecil berada pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi yakni sebesar 6.8%. Hal ini menunjukkan bahwa anggota aktif pada LPHD Desa Paccekke rata-rata lulusan SD dan SMP.

Temuan ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan anggota LPHD masih tergolong rendah. Hal ini dapat mencerminkan kondisi umum di daerah pedesaan, di mana akses dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih terbatas karena berbagai faktor, seperti kondisi

ekonomi, jarak sekolah, atau kebutuhan untuk membantu orang tua bekerja sejak usia muda.

#### 4. Status dalam LPHD

Status keanggotaan merujuk pada posisi atau kedudukan seseorang atau entitas dalam suatu organisasi, kelompok, atau sistem keanggotaan tertentu yang menentukan hak, kewajiban, dan akses terhadap layanan atau fasilitas yang disediakan oleh organisasi tersebut. Status ini bisa bersifat aktif, pasif, sementara, penuh, kehormatan, atau lainnya, tergantung pada kriteria yang telah ditentukan oleh organisasi.

Keanggotaan dalam suatu organisasi adalah suatu bentuk pengakuan terhadap individu yang telah memenuhi syarat tertentu dan diberi hak serta tanggung jawab sesuai dengan statusnya dalam organisasi tersebut (Siregar, R. 2019).

Klasifikasi berdasarkan status keanggotaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4, sebagai berikut:

**Tabel 4 Status Keanggotaan Responden**

No.	Status	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Anggota	15	100
2.	Bukan Anggota	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer Setelah Diolah Tahun 2025*

Tabel 4 menunjukkan persentase status keanggotaan responden 100% pada aktif. Hal ini menunjukkan bahwa 100% responden tersebut adalah anggota aktif LPHD Desa Paccekke. Dari total 17 individu yang terdaftar dalam populasi, hanya 15 responden yang dilibatkan dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan 2



orang anggota telah berpindah domisili, sementara itu SK keanggotaan belum mengalami revisi untuk menyesuaikan kondisi terbaru.

#### 4.3 Analisis Potensi Komoditi HHBK di LPHD Desa Paccekke

Berdasarkan hasil identifikasi di LPHD Desa Paccekke, komoditas aren yang sebelumnya menjadi salah satu produk utama masyarakat kini sudah tidak lagi diproduksi secara signifikan. Berikut Tabel 5 menunjukkan hasil identifikasi potensi komoditi di LPHD Desa Paccekke:

**Tabel 5 Identifikasi Potensi Komoditi**

No.	Nama	Kemiri	Aren	Madu
1	Mardihaan (A1)	√	-	√
2	Mahmudin (A2)	√	√	-
3	Bakri H (A3)	√	-	√
4	Sineng (A4)	√	-	√
5	Hasse (A5)	√	-	-
6	Jinade (A6)	√	√	-
7	Saharuddin (A7)	√	-	√
8	Bahar Lebby (A8)	√	-	√
9	Tangge (A9)	-	√	-
10	Laodding (A10)	√	-	√
11	Lasale (A11)	√	-	√
12	Abd Rauf (A12)	-	√	-
13	Masse (A13)	√	-	-
14	Basri S (A14)	√	-	√
15	Rais Basiri (A15)	√	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>Persentase</b>		<b>86.66 %</b>	<b>26.66 %</b>	<b>53.33 %</b>

*Sumber: Data Primer Setelah Diolah Tahun 2025*

Tabel 5 menunjukkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa hanya sekitar 26% responden yang masih memanfaatkan pohon aren. Sebaliknya, komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) lain seperti kemiri dan madu menunjukkan perkembangan yang lebih pesat. Sebanyak 86% responden

menyatakan aktif memproduksi kemiri, sementara 53% lainnya terlibat dalam budidaya dan pengolahan madu. Kedua komoditas ini telah memiliki nilai jual dan jaringan pasar yang lebih jelas, menjadikannya sebagai HHBK yang bersifat komoditif dan berpotensi menjadi sumber pendapatan utama masyarakat sekitar hutan.

#### 4.4 Analisis Pendapatan HHBK Kemiri di LPHD Desa Paccekke

Pendapatan masyarakat pengelola LPHD adalah semua penerimaan dari hasil usaha di dalam kawasan Hutan Desa di kurangi dengan semua pengeluaran pada saat melakukan usaha. Untuk mengetahui berapa besar pendapatan masyarakat pengelola kemiri di Hutan Desa di Desa Paccekke, dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6 Pendapatan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Desa Paccekke**

No.	Nama Responden	Penerimaan (Rp / Tahun)	Biaya (Rp / Tahun)	Pendapatan (Rp/ Tahun )
1	Mardiha (A1)	6.750.000	462.000	<b>6.288.000</b>
2	Mahmudin (A2)	7.950.000	390.500	7.559.500
3	Bakri H (A3)	7.350.000	465.000	6.885.000
4	Sineng (A4)	7.050.000	373.500	6.676.500
5	Hasse (A5)	6.750.000	400.500	6.349.500
6	Jinade (A6)	8.550.000	875.000	7.675.000
7	Saharuddin (A7)	8.550.000	480.000	8.070.000
8	Bahar Lebbi (A8)	7.950.000	387.000	7.563.000
9	Tangge (A9)	-	-	-
10	Laodding (A10)	7.350.000	460.000	6.890.000
11	Lasale (A11)	10.200.000	480.000	<b>9.720.000</b>
12	Abd Rauf (A12)	-	-	-
13	Masse (A13)	9.600.000	1.140.000	8.460.000
14	Basri S (A14)	9.000.000	345.000	8.655.000
15	Rais Basiri (A15)	7.800.000	340.500	7.459.500
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 104.850.000</b>	<b>Rp. 6.599.000</b>	<b>Rp. 98.251.000</b>
<b>Rata - Rata</b>		<b>Rp. 7.361.538</b>	<b>Rp. 507.615</b>	<b>Rp. 7.557.769</b>

Sumber: Data Primer Setelah Diolah Tahun 2025

Pada Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa dari 15 anggota aktif, hanya 13 orang yang mengelola kemiri sebagai penghasilan dari jenis HHBK di LPHD Desa Paccekke. Dari hasil penelitian yang di peroleh, kemiri di panen sebanyak 2 kali dalam setahun, namun dalam jumlah panen yang cukup besar. Dari tabel diatas pula dapat dilihat bahwa total penerimaan masyarakat pengelola LPHD yang mengelola kemiri sebanyak Rp. 104.850.000/ dalam setahun, dengan rata- rata penerimaan Rp. 7.361.538/tahun, dikurangi dengan pengeluaran yang di dikeluarkan oleh masyarakat yang mengelola kemiri sebanyak Rp. 6.599.000/tahun dengan rata-rata pengeluaran Rp. 507.615/tahun. Jadi total pendapatan masyarakat pengelola kemiri sebesar Rp. 98.251.000/tahun dengan rata- rata pendapatan sebanyak Rp. 7.557.769/tahun.

Tabel 6 menunjukkan bahwa Lasale (A11) memperoleh pendapatan terbesar dalam pengelolaan kemiri yakni Rp. 9.720.000/tahun. Sedangkan Mardihan (A1) memperoleh pendapatan terkecil dalam pengelolaan kemiri yakni Rp.6.288.000/tahun. Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang diperoleh selama satu siklus panen tahunan, diketahui bahwa jumlah hasil panen kemiri pada panen pertama (bulan April–Mei) secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan panen kedua (bulan September–Oktober). Temuan ini sejalan dengan kecenderungan umum yang diamati di daerah-daerah sentra produksi kemiri di Indonesia.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya hasil panen pada musim pertama adalah kondisi lingkungan pascahujan yang mendukung pertumbuhan dan pembentukan buah. Selama bulan-bulan menjelang panen April–Mei, yaitu sekitar

Desember hingga Maret, curah hujan berada pada tingkat tinggi hingga sedang, sehingga kandungan air tanah mencukupi untuk menunjang proses fisiologis tanaman. Tanaman kemiri dalam kondisi ini mampu menghasilkan bunga dan buah dalam jumlah lebih banyak dan dengan kualitas yang baik.

Sebaliknya, panen kedua yang berlangsung pada bulan September–Oktober terjadi setelah melewati musim kemarau panjang, di mana curah hujan sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi kekeringan ini berdampak negatif terhadap kinerja fisiologis tanaman, termasuk menurunnya kemampuan dalam menyerap air dan nutrisi, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas. Selain itu, tanaman belum sepenuhnya pulih dari siklus reproduksi sebelumnya, mengingat jarak waktu antar dua panen hanya berkisar empat hingga lima bulan. Hal ini membuat cadangan energi tanaman masih terbatas untuk membentuk bunga dan buah secara maksimal pada musim kedua.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah suhu dan kelembaban udara. Panen pertama didahului oleh musim penghujan dengan kelembaban relatif tinggi, yang mendukung aktivitas serangga penyerbuk. Sementara itu, suhu tinggi dan kelembaban rendah pada musim kemarau menjelang panen kedua menyebabkan penurunan aktivitas penyerbukan alami, serta peningkatan stres lingkungan bagi tanaman, yang berdampak pada berkurangnya kuantitas buah yang terbentuk.

Dengan demikian, perbedaan signifikan antara panen pertama dan panen kedua dalam hal jumlah hasil kemiri bukan hanya disebabkan oleh faktor waktu, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara iklim, fisiologi tanaman, dan

ekosistem pendukung. Hasil ini mendukung pemahaman bahwa musim panen pertama lebih ideal dalam strategi budidaya dan pemasaran komoditas kemiri.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Makkarennu dkk. (2023) di KPHL Selayar, ditemukan bahwa kontribusi kemiri terhadap pendapatan masyarakat di lokasi tersebut mencapai sekitar Rp 122.860.000 per tahun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian ini, baik secara total maupun persentase kontribusi terhadap ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa di KPHL Selayar, kemiri menjadi salah satu komoditas utama yang menopang penghidupan masyarakat, sementara pada lokasi penelitian ini peran kemiri kemungkinan bersifat pelengkap atau musiman.

Selain itu, jika dibandingkan dengan hasil penelitian Hamzany dkk di Desa Sambabo, Majene, diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani dari usaha tani kemiri mencapai sekitar Rp 16.079.000 per tahun, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata pendapatan pada penelitian ini. Disparitas tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas produksi dan nilai ekonomi antarwilayah, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas dan kepemilikan lahan kemiri, metode pengelolaan dan intensitas perawatan tanaman, ketersediaan akses pasar dan harga jual, serta dukungan kelembagaan atau program pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kemiri memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan, namun kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan praktik pengelolaannya.



#### 4.5 Analisis Pendapatan HHBK Aren di LPHD Desa Paccekke

Untuk mengetahui berapa besar pendapatan masyarakat pengelola aren di Hutan Desa di Desa Paccekke, dapat di lihat pada Tabel 7, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 7 Pendapatan Masyarakat Pengelola Aren di LPHD Desa Paccekke**

No.	Nama Responden	Penerimaan (Rp /Tahun)	Biaya (Rp / Tahun)	Pendapatan (Rp/ Tahun )
1	Mardihan (A1)	-	-	-
2	Mahmudin (A2)	3.808.000	680.000	3.128.000
3	Bakri H (A3)	-	-	-
4	Sineng (A4)	-	-	-
5	Hasse (A5)	-	-	-
6	Jinade (A6)	2.968.000	667.500	<b>2.300.500</b>
7	Saharuddin (A7)	-	-	-
8	Bahar Lebbi (A8)	-	-	-
9	Tangge (A9)	3.724.000	715.000	3.009.000
10	Laodding (A10)	-	-	-
11	Lasale (A11)	-	-	-
12	Abd Rauf (A12)	4.256.000	817.500	<b>3.438.500</b>
13	Masse (A13)	-	-	-
14	Basri S (A14)	-	-	-
15	Rais Basiri (A15)	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 14.756.000</b>	<b>Rp. 2.880.000</b>	<b>Rp. 11.876.000</b>
<b>Rata - Rata</b>		<b>Rp. 3.689.000</b>	<b>Rp. 720.000</b>	<b>Rp. 2.969.000</b>

Sumber: Data Primer Setelah Diolah Tahun 2025

Pada Tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa dari 15 anggota aktif, hanya 4 orang yang masih mengelola aren sebagai penghasilan dari jenis HHBK di LPHD Desa Paccekke. Dari hasil penelitian, aren di panen dan di produksi menjadi gula merah/aren sebanyak 3 kali dalam setahun. Dari tabel diatas pula dapat dilihat bahwa total penerimaan masyarakat pengelola LPHD yang mengelola aren sebanyak Rp. 14.756.000/tahun, dengan rata- rata penerimaan Rp. 3.689.000/tahun atau 3 kali panen, dikurangi dengan pengeluaran yang di dikeluarkan oleh masyarakat yang mengelola aren sebanyak Rp. 2.880.000/tahun dengan rata-rata pengeluaran

Rp. 720.000/Tahun. Jadi total pendapatan masyarakat pengelola aren sebesar Rp.11.876.000 /tahun dengan rata- rata pendapatan sebanyak Rp. 2.969.000/tahun.

Tabel 7 menunjukkan Abd Rauf (A12) memperoleh pendapatan terbesar dalam pengelolaan aren yaitu Rp. 3.438.500/tahun. Sedangkan Jinade (A6) memperoleh pendapatan terkecil dalam pengelolaan aren yaitu Rp. 2.300.500/tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman aren dapat dipanen hingga tiga kali dalam satu tahun dengan produktivitas yang bervariasi pada setiap musim panen. Variasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor lingkungan dan fisiologis yang memengaruhi produksi nira sebagai bahan baku utama dari tanaman aren.

Secara umum, panen pertama yang dilakukan pada periode Maret–April. Pada waktu ini, pohon aren mulai pulih dari musim hujan dengan ketersediaan air tanah yang masih cukup tinggi, namun aktivitas biologis tanaman belum mencapai puncaknya. Ini menyebabkan volume nira yang keluar dari tandan bunga cenderung stabil, tetapi belum maksimal. Selain itu, suhu mulai meningkat secara perlahan, dan intensitas cahaya matahari meningkat, yang mendukung aktivitas fotosintesis. Namun, karena musim hujan baru saja berakhir, kelembaban lingkungan masih tinggi, yang dapat menyebabkan luka sadap tetap basah dan lebih mudah ditumbuhi mikroorganisme. Secara teknis, ini berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas nira jika sanitasi alat penyadapan tidak dijaga. Di sisi lain, tenaga kerja penyadap masih tersedia cukup banyak, karena belum bertepatan dengan musim tanam komoditas utama seperti padi, sehingga kegiatan penyadapan bisa berlangsung

intensif. Hasil panen pada musim ini cenderung sedang, karena tanaman mulai aktif kembali pascahujan, namun belum mencapai puncak fisiologis produksi.

Panen kedua merupakan periode puncak produksi aren. Musim kemarau yang stabil, suhu tinggi, dan kelembaban rendah menciptakan kondisi yang ideal untuk penyadapan. Luka sadap cepat kering dan bersih, sehingga efisiensi penyadapan meningkat dan risiko kontaminasi menurun. Selain itu, ketersediaan sinar matahari optimal mendorong peningkatan fotosintesis dan metabolisme tanaman, yang mempercepat pergerakan nira di jaringan. Secara fisiologis, tanaman berada dalam fase aktif produksi, dan bila sebelumnya telah dilakukan rotasi atau istirahat penyadapan, maka cadangan energi dan nutrisi tanaman cukup untuk menopang aliran nira yang tinggi.

Dari sisi agroekosistem, musim kemarau memberikan keuntungan karena drainase tanah optimal, menghindari genangan yang dapat merusak akar. Pada lahan yang memiliki akses baik dan tidak terlalu curam, kegiatan penyadapan lebih mudah dilakukan dan produktivitas tenaga kerja juga meningkat. Secara sosial, musim ini juga merupakan periode di mana harga jual produk olahan nira cenderung stabil karena pasokan bahan baku cukup. Petani termotivasi untuk menyadap lebih intensif, sehingga volume panen meningkat. Panen kedua menghasilkan jumlah nira terbanyak dibandingkan musim lainnya.

Sedangkan panen ketiga dilakukan saat musim hujan mulai kembali. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penurunan volume dan kualitas nira. Kelembaban tinggi dan curah hujan yang sering menyebabkan luka sadap cepat rusak dan meningkatkan kemungkinan kontaminasi oleh mikroorganisme. Nira yang

terkumpul juga lebih cepat mengalami fermentasi, bahkan saat masih berada di pohon. Secara fisiologis, pohon mulai memasuki fase transisi dari musim kering ke basah, dan cadangan energi tanaman mulai menurun karena proses penyadapan yang sudah berlangsung selama beberapa bulan sebelumnya. Ini memperburuk kapasitas produksi tanaman bila tidak ada jeda istirahat penyadapan.

Dari segi agroekosistem, curah hujan yang tinggi menyebabkan jalan akses menjadi licin atau sulit dilalui, sehingga aktivitas penyadapan dan pengangkutan hasil menjadi terkendala. Ditambah lagi, musim ini sering bertepatan dengan musim tanam utama, seperti padi, yang menyebabkan berkurangnya tenaga kerja penyadap karena beralih ke lahan sawah. Secara umum, panen ketiga menghasilkan volume nira paling rendah, baik karena faktor iklim yang tidak mendukung maupun tekanan sosial-ekonomi yang membatasi intensitas penyadapan.

Berdasarkan tiga musim panen dalam satu tahun, dapat disimpulkan bahwa produktivitas aren paling tinggi terjadi pada panen kedua (Juli–Agustus), sedang pada panen pertama (Maret–April), dan paling rendah pada panen ketiga (November–Desember). Perbedaan ini disebabkan oleh faktor lingkungan (curah hujan, suhu, kelembaban), kondisi fisiologis tanaman, manajemen teknis penyadapan, karakteristik lahan, serta ketersediaan dan fokus tenaga kerja. Pemahaman terhadap dinamika musiman ini menjadi sangat penting untuk menyusun strategi penyadapan yang adaptif, seperti penjadwalan istirahat tanaman, pemilihan waktu penyadapan yang tepat, serta pengaturan tenaga kerja dan pemasaran produk nira.



Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Manambangtua dkk. (2018) di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, terlihat perbedaan yang cukup mencolok. Di Tomohon, rata-rata pendapatan petani aren mencapai Rp 23.121.420 per tahun, dengan pendapatan bulanan sekitar Rp 1.926.785, serta nilai rasio R/C sebesar 1,88 yang menunjukkan bahwa usaha tani aren tergolong layak dan menguntungkan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendapatan petani aren di Desa Paccekke hanya sekitar 12,8% dari yang diperoleh petani di Tomohon.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan hasil penelitian Sri Wahyuni Haris dkk. di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, masyarakat pengelola aren di sana memperoleh pendapatan sebesar Rp 10.864.500 per tahun untuk produksi gula blok dan Rp 7.555.200 per tahun untuk produksi gula cair. Kedua jenis usaha tersebut masih menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat di Desa Paccekke. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan, baik dari segi volume produksi, kapasitas pengolahan, maupun akses pasar.

Rendahnya pendapatan di Desa Paccekke dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang sudah peneliti jelaskan diatas, seperti jumlah pohon produktif yang terbatas, metode produksi yang masih sederhana, rendahnya nilai jual produk, serta belum optimalnya pemanfaatan produk turunan aren seperti gula semut, ijuk, atau kolang-kaling. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan produktivitas dan pengembangan hilirisasi produk untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat pengelola aren di daerah tersebut.



#### 4.6 Analisis Pendapatan HHBK Madu di LPHD Desa Paccekke

Untuk mengetahui berapa besar pendapatan masyarakat pengelola madu di Hutan Desa di Desa Paccekke, dapat di lihat pada Tabel 8, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 8 Pendapatan Masyarakat Pengelola Madu di LPHD Desa Paccekke**

No.	Nama Responden	Penerimaan (Rp /Tahun)	Biaya (Rp / Tahun)	Pendapatan (Rp/ Tahun )
1	Mardihan (A1)	8.160.000	1.800.000	6.360.000
2	Mahmudin (A2)	-	-	-
3	Bakri H (A3)	8.160.000	1.710.000	<b>6.450.000</b>
4	Sineng (A4)	7.560.000	1.565.000	5.995.000
5	Hasse (A5)	-	-	-
6	Jinade (A6)	-	-	-
7	Saharuddin (A7)	7.320.000	1.560.000	5.760.000
8	Bahar Lebbi (A8)	7.680.000	1.570.000	6.110.000
9	Tangge (A9)	-	-	-
10	Laodding (A10)	7.200.000	1.595.000	<b>5.605.000</b>
11	Lasale (A11)	7.920.000	1.590.000	6.330.000
12	Abd Rauf (A12)	-	-	-
13	Masse (A13)	-	-	-
14	Basri S (A14)	7.920.000	1.780.000	6.140.000
15	Rais Basiri (A15)	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 52.560.000</b>	<b>Rp. 13.170.000</b>	<b>Rp. 48.750.000</b>
<b>Rata - Rata</b>		<b>Rp. 6.570.000</b>	<b>Rp. 1.646.250</b>	<b>Rp. 6.093.750</b>

*Sumber: Data Primer Setelah Diolah Tahun 2025*

Pada Tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa dari 15 anggota aktif, hanya 8 orang yang mengelola madu sebagai penghasilan dari jenis HHBK di LPHD Desa Paccekke. Dari hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa madu di panen sebanyak 3 kali dalam setahun. Dari tabel diatas pula dapat dilihat bahwa total penerimaan masyarakat pengelola LPHD yang mengelola madu sebanyak Rp52.560.000/tahun atau 3 kali panen, dengan rata- rata penerimaan Rp.6.570.000/tahun, dikurangi dengan pengeluaran yang di keluarkan oleh masyarakat yang mengelola madu sebanyak Rp. 13.170.000/tahun dengan rata-rata

pengeluaran Rp. 1.646.250/tahun. Jadi total pendapatan masyarakat pengelola madu sebesar Rp. 47.750.000/tahun dengan rata-rata pendapatan sebanyak Rp.6.093.750/tahun. Tabel 8 menunjukkan bahwa Bakri H (A3) memperoleh pendapatan terbesar dalam pengelolaan madu sebesar Rp. 6.450.000/tahun. Sedangkan Laodding (A10) memperoleh pendapatan terkecil dalam pengelolaan madu yaitu sebesar Rp.5.605.000/tahun.

Pada hasil penelitian yang dilakukan, dalam satu tahun budidaya lebah madu, dilakukan tiga kali panen yang masing-masing menunjukkan variasi hasil yang berbeda. Urutan panen madu tersebut umumnya dilakukan pada awal tahun (sekitar Maret–April), pertengahan tahun (Juli–Agustus), dan akhir tahun (Oktober–Desember). Hasil panen menunjukkan perbedaan signifikan pada setiap periode, yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, ketersediaan sumber pakan, serta kesehatan koloni lebah.

Panen pertama, yang dilakukan pada bulan Maret hingga April, biasanya memberikan hasil yang cukup baik. Pada periode ini, koloni lebah mulai aktif kembali setelah melewati musim kering atau musim paceklik bunga. Madu yang dihasilkan umumnya berasal dari bunga-bunga yang mulai bermekaran di awal musim hujan, seperti bunga karet, akasia, dan tanaman semusim. Koloni lebah dalam kondisi sehat dan produktif karena terdapat pasokan nektar yang mulai stabil.

Panen kedua dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus, dan menjadi panen dengan hasil tertinggi sepanjang tahun. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan bunga yang melimpah, terutama dari tanaman kaliandra, randu, dan flora lokal lainnya yang sedang berada dalam puncak masa berbunga. Aktivitas koloni mencapai titik

optimal karena didukung cuaca cerah, sumber pakan berlimpah, dan suhu yang mendukung aktivitas foraging (pengumpulan nektar). Oleh karena itu, panen pada periode ini menghasilkan volume madu paling banyak dibandingkan panen lainnya.

Panen ketiga, yang dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember, biasanya menghasilkan volume madu yang lebih rendah dibanding dua panen sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya intensitas bunga yang mekar menjelang musim hujan, serta berkurangnya aktivitas lebah akibat perubahan cuaca yang tidak menentu. Selain itu, lebah mulai menyimpan nektar sebagai cadangan makanan menghadapi musim sulit, sehingga produksi madu untuk dipanen menjadi terbatas.

Perbedaan hasil panen tiap musim tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, antara lain:

- a. Ketersediaan sumber pakan (nektar dan serbuk sari) yang sangat bergantung pada musim berbunga tanaman sekitar.
- b. Kondisi cuaca, termasuk curah hujan, suhu, dan angin, yang menentukan tingkat aktivitas lebah dalam mencari makanan.
- c. Kesehatan koloni lebah, yang mencakup jumlah lebah pekerja, produktivitas ratu, dan keberadaan hama atau penyakit.
- d. Manajemen pemeliharaan, seperti rotasi lokasi koloni (migrasi), pemberian pakan tambahan, dan teknik pemanenan yang diterapkan oleh peternak.
- e. Jenis lebah yang dibudidayakan, di mana *Apis mellifera* memiliki kapasitas produksi madu lebih tinggi dibanding *Apis cerana*, namun memerlukan manajemen yang lebih intensif.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, peternak lebah madu dapat memaksimalkan hasil panen pada setiap musim, serta menjaga keberlanjutan dan kesehatan koloni lebah dalam jangka panjang.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian di Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang mencatat rata-rata pendapatan masyarakat dari madu hutan sebesar Rp 4.474.280 per tahun per rumah tangga, maka pendapatan masyarakat di Paccekke masih lebih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah koloni lebah yang lebih sedikit, teknik panen tradisional yang belum efisien, atau keterbatasan akses pasar dan harga jual yang rendah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa, meskipun sama-sama berada di wilayah Sulawesi Selatan, terdapat disparitas pendapatan yang menunjukkan potensi pengembangan yang belum optimal di Desa Paccekke

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan penelitian di Desa Cenrana Baru, Kabupaten Maros, ditemukan bahwa rata-rata pendapatan petani madu di daerah tersebut mencapai Rp 3.927.834,78 per tahun, dengan rentang pendapatan individu mulai dari Rp 940.000 hingga Rp 20.880.000 per tahun. Pendapatan rata-rata ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditemukan di Desa Paccekke. Selain itu, rentang pendapatan yang cukup lebar di Cenrana Baru menunjukkan bahwa hasil dari usaha madu sangat dipengaruhi oleh jumlah sarang yang dikelola, frekuensi panen, dan kapasitas produksi masing-masing individu.

Secara keseluruhan, perbandingan ini mengindikasikan bahwa meskipun madu memiliki kontribusi terhadap pendapatan masyarakat di Desa Paccekke, kontribusinya masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain yang telah



mengembangkan pengelolaan madu secara lebih intensif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknis, pengorganisasian kelompok tani madu, dan pengembangan akses pasar menjadi penting untuk meningkatkan nilai ekonomi HHBK madu di wilayah tersebut.

#### 4.7 Analisis Pendapatan HHBK di LPHD Desa Paccekke

Analisis total pendapatan adalah seluruh pendapatan yang didapatkan dari usaha pengelolaan seluruh hhbK yang ada. Untuk mengetahui total pendapatan masyarakat pengelola kemiri, aren dan madu di Lembaga Desa Pengelola Desa (LPHD) Desa Paccekke dapat dilihat pada Tabel 9, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 9 Total Pendapatan HHBK LPHD Desa Paccekke**

No.	Nama	Pendapatan Kemiri (Rp / Tahun)	Pendapatan Aren (Rp / Tahun)	Pendapatan Madu Rp / Tahun)	Pendapatan Total (Rp / Tahun)
1	A1	6.288.000	-	6.360.000	12.648.000
2	A2	7.559.500	3.128.000	-	10.687.500
3	A3	6.885.000	-	6.450.000	13.335.000
4	A4	6.676.500	-	5.995.000	12.671.500
5	A5	6.349.500	-	-	6.349.500
6	A6	7.675.000	2.300.500	-	9.975.500
7	A7	8.070.000	-	5.760.000	13.830.000
8	A8	7.563.000	-	6.110.000	13.673.000
9	A9	-	3.009.000	-	3.009.000
10	A10	6.890.000	-	5.605.000	12.495.000
11	A11	9.720.000	-	6.330.000	16.050.000
12	A12	-	3.438.500	-	3.438.500
13	A13	8.460.000	-	-	8.460.000
14	A14	8.655.000	-	Rp. 6.140.000	14.795.000
15	A15	7.459.500	-	-	7.459.500
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 98.251.000</b>	<b>Rp. 11.876.000</b>	<b>Rp. 48.750.000</b>	<b>Rp. 158.877.000</b>
<b>Rata - Rata</b>		<b>Rp. 7.557.769</b>	<b>Rp. 2.969.000</b>	<b>Rp. 6.093.750</b>	<b>Rp. 16.620.519</b>

*Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2025*



Pada Tabel 9 menunjukkan dari 15 responden di atas dapat diketahui bahwa pendapatan masyarakat pengelola Hutan Desa yang mengelola kemiri sebanyak Rp.98.251.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp. 7.557.769/tahun, lalu pendapatan aren sebanyak Rp 11.876.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp.2.969.000/tahun, sedangkan pendapatan pengelola madu sebanyak Rp.48.750.000/tahun dengan rata-rata pendapatan Rp. 6.093.750/tahun. Total pendapatan dari kemiri, aren dan madu sebanyak Rp. 158.877.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp. 16.620.519/tahun.



**Gambar 3 Total dan Rata Rata Pendapatan HHBK LPHD Desa Paccekke Pertahun**

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel dan grafik yang ada, diketahui bahwa dari 15 responden yang terlibat dalam penelitian, sumber pendapatan utama masyarakat pengelola Hutan Desa berasal dari komoditas kemiri, aren, dan madu. Dari ketiga komoditas tersebut, kemiri memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kemiri

merupakan komoditas yang paling potensial secara ekonomi dalam sistem pengelolaan hutan desa di wilayah penelitian.

Sementara itu, pendapatan dari pengelolaan aren tercatat dengan angka yang tergolong rendah dibandingkan kemiri, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti produktivitas pohon aren yang menurun, keterbatasan alat produksi, serta kurangnya pelatihan teknis yang relevan, sebagaimana juga ditemukan dalam hasil wawancara sebelumnya.

Adapun pendapatan dari komoditas madu yang nilainya masih berada di bawah kemiri, madu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama jika didukung oleh pelatihan teknis dan akses pasar yang lebih luas.

Secara keseluruhan, total pendapatan mengindikasikan bahwa pengelolaan Hutan Desa memiliki nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat, meskipun besaran pendapatannya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, diversifikasi produk, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelola hutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah mengembangkan berbagai jenis HHBK sebagai bagian dari strategi pelestarian hutan berbasis masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal.

Tiga jenis HHBK utama yang dikelola secara aktif oleh LPDH adalah kemiri, aren, dan madu. Ketiga komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang

cukup signifikan dan telah menjadi bagian integral dari kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat desa. Selain memiliki fungsi ekonomi, pengelolaan HHBK tersebut juga mendukung pelestarian lingkungan dan penguatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Di samping komoditas utama tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya pengelolaan HHBK lain yang tidak kalah potensial, yaitu cengkeh, kopi, dan coklat (kakao). Meskipun belum menjadi fokus utama, tanaman-tanaman ini telah mulai dibudidayakan secara mandiri oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan dan lahan agroforestri. Diversifikasi HHBK ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Paccekke tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas, melainkan terus beradaptasi dengan potensi lokal dan peluang pasar yang ada.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan HHBK di Desa Paccekke telah berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan. Diversifikasi komoditas HHBK menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan desa.

#### **4.8 Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan**

Selain pendapatan, peneliti juga meneliti terkait faktor yang mempengaruhi pendapatan para anggota aktif terkhusus pada pengelolaan aren. Hal ini selain untuk menambah wawasan, peneliti juga ingin melihat faktor apa yang membuat aren sudah tidak komoditif lagi di LPHD Desa Paccekke.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas petani atau pelaku usaha pengolahan aren belum mendapatkan pelatihan teknisterkait budidaya maupun

pengelolaan hasil komoditas aren. Hal ini menunjukkan rendahnya dukungan terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia, yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk lokal (Syahyuti, 2020). Kurangnya pelatihan ini juga berdampak pada rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna di tingkat petani.

Di sisi lain, akses ke pasar dinilai sudah memadai, namun sistem distribusi masih bergantung pada perantara, terutama dalam penjualan produk olahan utama berupa gula aren. Ketergantungan ini menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai pasok (Sumaryanto & Siregar, 2019), sehingga margin keuntungan yang diterima cenderung lebih kecil.

Dalam hal tantangan, responden menyebutkan bahwa fluktuasi harga pasar, keterbatasan alat produksi, dan berkurangnya jumlah pohon aren menjadi hambatan utama. Ini sejalan dengan penelitian Arifin (2018), yang menyatakan bahwa keterbatasan infrastruktur dan ketidakstabilan pasar merupakan faktor dominan yang menghambat pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa produktivitas lahan dan ketersediaan alat modern merupakan faktor utama yang memengaruhi pendapatan petani. Hal ini mendukung temuan Sutrisno (2021) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara adopsi teknologi dan peningkatan pendapatan petani dalam sektor agroforestri.

Terkait persepsi terhadap LPHD, sebagian besar responden menilai LPHD membantu dalam peningkatan pendapatan, khususnya melalui dukungan kelembagaan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Kelembagaan lokal

seperti LPHD memiliki peran penting dalam membangun tata kelola hutan desa yang inklusif dan berkelanjutan (Wardhana & Nurrochmat, 2020)

Namun demikian, responden juga memberikan beberapa saran, di antaranya: pentingnya dilakukan peremajaan pohon aren, penambahan bibit unggul, serta penyelenggaraan pelatihan pengelolaan aren yang lebih memadai. Selain itu, mereka juga menyarankan revisi terhadap SK keanggotaan LPHD, guna meningkatkan keaktifan dan partisipasi anggota. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Lestari dan Mahendra (2022), yang menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang partisipatif dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.





## V. KESIMPULAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pendapatan masyarakat pengelola Hutan Desa yang mengelola kemiri sebanyak Rp.98.251.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp. 7.557.769/tahun, lalu pendapatan aren sebanyak Rp 11.876.000/tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp.2.969.000/tahun, sedangkan pendapatan pengelola madu sebanyak Rp.48.750.000/tahun dengan rata-rata pendapatan Rp. 6.093.750/tahun. Total pendapatan dari kemiri, aren dan madu sebanyak Rp. 158.877.000 /tahun, dengan rata-rata pendapatan Rp.16.620.519 /tahun.

Berdasarkan hasil penelitian ini pula dapat diketahui bahwa pengelolaan Hutan Desa, khususnya melalui komoditas kemiri, madu, dan aren, memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan masyarakat. Kemiri merupakan komoditas dengan kontribusi pendapatan tertinggi, diikuti oleh madu dan terakhir aren. Meski demikian, total pendapatan yang diperoleh masyarakat masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, diversifikasi produk, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelola hutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga menunjukkan komoditas aren mengalami penurunan daya saing, yang disebabkan oleh beberapa faktor utama,

seperti rendahnya produktivitas lahan, keterbatasan alat produksi, berkurangnya jumlah pohon, dan kurangnya pelatihan teknis. Meskipun akses pasar dianggap cukup baik, sistem penjualan yang bergantung pada perantara menyebabkan posisi tawar petani lemah dan margin keuntungan menjadi kecil.

LPHD dinilai memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan pembenahan kelembagaan agar perannya semakin optimal, terutama dalam penguatan kapasitas anggota dan pengelolaan komoditas unggulan.

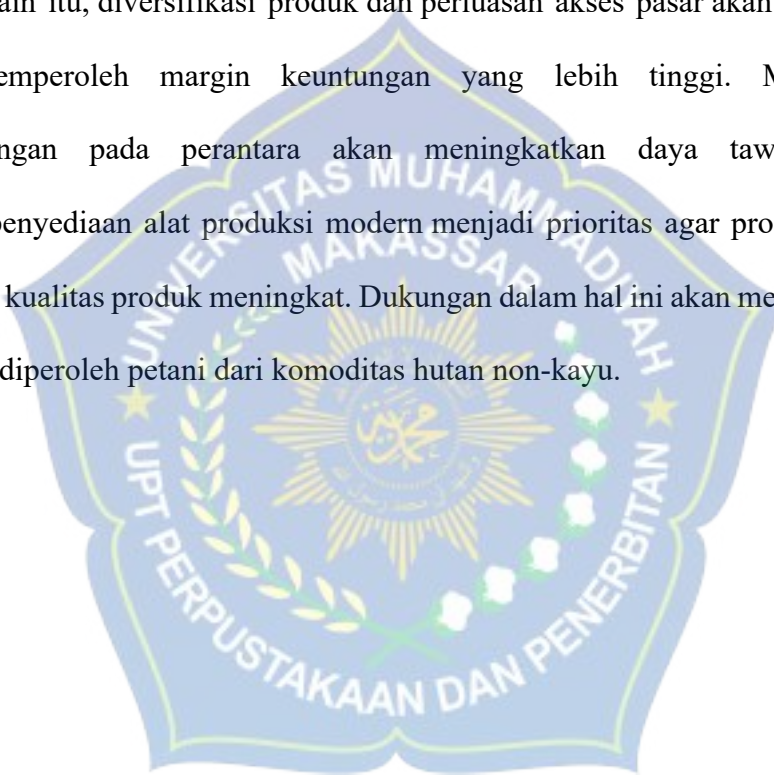
Dominasi kelompok usia tua dalam LPHD, ditambah minimnya keterlibatan pemuda akibat urbanisasi dan pergeseran minat kerja, menjadi tantangan serius dalam menjaga produktivitas dan kesinambungan usaha HHBK di Desa Paccekke. Diperlukan strategi pelibatan pemuda secara aktif—baik melalui pendidikan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal, pelatihan HHBK modern, maupun insentif ekonomi—agar regenerasi dapat berjalan dan produktivitas tetap terjaga dalam jangka panjang.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa langkah strategis diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelola Hutan Desa. Pertama, peningkatan pelatihan teknis untuk budidaya dan pengolahan komoditas sangat penting agar petani dapat memanfaatkan teknologi tepat guna dan meningkatkan produktivitas.

Selanjutnya, perlu dilakukan peremajaan pohon aren secara berkala serta penyediaan bibit unggul untuk mendukung keberlanjutan dan meningkatkan hasil produksi aren. Penguatan kelembagaan LPHD juga krusial, dengan melakukan revisi terhadap SK keanggotaan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan efektivitas pengelolaan hutan desa.

Selain itu, diversifikasi produk dan perluasan akses pasar akan membantu petani memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi. Mengurangi ketergantungan pada perantara akan meningkatkan daya tawar petani. Terakhir, penyediaan alat produksi modern menjadi prioritas agar produksi lebih efisien dan kualitas produk meningkat. Dukungan dalam hal ini akan meningkatkan hasil yang diperoleh petani dari komoditas hutan non-kayu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., Muin, S., & Oramahi, H. A. (2016). Sikap masyarakat terhadap penetapan areal kerja hutan desa di Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(2), 193–204.
- Ahmad, M. (2024, Januari 5). Pemuda desa, generasi penerus yang terlupakan. *Kompasiana*.
- Aminah, A., & Ariyadi, A. (2022). Policy analysis of the Ajatappareng technical implementing unit (UPT) on the rehabilitation of protected forest and land (RHL) by PT Inhutani in Pujananting Village Pujananting District Barru District. *Meraja Journal*, 5(3), 1–39.
- Arianti, S. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(2), 1–10.
- Arifin, B. (2018). Pengembangan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan*, 15(2), 101–112.
- Armalia, N. D. (2018). *Pengaruh literasi keuangan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap pemilihan jenis investasi pada masyarakat Sidoarjo* [Disertasi doktoral, STIE Perbanas Surabaya].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. (2024). *Kabupaten Barru dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Barru.
- Dewi, I. N. (2018). Kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial. *Buletin Eboni*, 15(2), 65–77.

- Effendi, R., Nugroho, D. A., & Kurniasih, H. (2017). Dinamika kelompok tani dalam pengelolaan hutan rakyat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 11(1), 45–55.
- Erawati, T., & Pramelia, N. (2022). E-commerce, inovasi, pricing, dan pendapatan UMKM di masa pandemi Covid-19. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(6), 1–10.
- Faharuddin. (2012). Penentuan jenis komoditas berdasarkan potensi wilayah. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 5(1), 45–53.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2019). *Country gender assessment of agriculture and the rural sector in Indonesia*. FAO.
- Forest Watch Indonesia. (2019). *Evaluasi implementasi perhutanan sosial di Indonesia: Peluang dan tantangan*. Forest Watch Indonesia.
- Hafidah, N., Arafah, N., Marwah, S., Rosmarlinasiah, & Mando, L. O. A. S. (2023). Peran gender dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Celebica: Jurnal Kehutanan Indonesia*, 4(2), 239–249.
- Harto, D., et al. (2019). Penerapan internet marketing dalam meningkatkan pendapatan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 1–10.
- Haryanto, A. (2020). Analisis tantangan dan peluang peningkatan pendapatan petani aren di HD Paccekke. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 15(2), 123–135.
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (Edisi ke-10). Rajawali Pers.



- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk-Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial*. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). *Laporan tahunan KLHK 2020*. KLHK.
- Kusumawati, P. (2022). *Pengelolaan kawasan lindung*. Buku.
- Laksemi, N. P. S. T., & Sulistyawati, E. (2019). Perhutanan sosial berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi kasus di Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 150–163.
- Lestari, D. (2021). Analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan pada PT. Artha Lestari Engineering periode 2020 hingga 2023. *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Widyakarya*, 5(1), 45–63.
- Lestari, E., & Mahendra, A. (2022). Kelembagaan dan partisipasi dalam pengelolaan hutan desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(1), 56–64.
- Manalu, A. G. B., Subono, N. I., & Dewi, R. D. D. G. S. (2022). Partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial: Studi kasus di lima provinsi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 24(1), 85–99.
- Mardani, D. (2024). Patriot desa: Melahirkan generasi muda yang cinta kampung halaman. *Kompasiana*.
- Maulana, I. A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 1–10.

- Muria, G. (2018). Pengaruh pendapatan dan biaya operasional terhadap laba bersih (studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2012–2016). *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 19–33.
- Parthama, I. (2019). Peran pengelola hutan desa dalam mitigasi risiko bencana alam di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 123–135.
- Pratiwi, D. A., Santoso, H., & Nugroho, B. (2022). Pengembangan kelembagaan skema kemitraan kehutanan di Kabupaten Lampung Barat [Skripsi, Universitas Lampung].
- PRCF Indonesia. (2023). *LPHD Lauk Bersatu serahkan laporan pengelolaan Hutan Desa tahun 2022*.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 1707–1715.
- Puspa, D. F., Santoso, H., & Nugroho, B. (2023). Transformasi pengelolaan hutan: Dari pendekatan sentralistik menuju perhutanan sosial inklusif. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 10(2), 150–165.
- Qurniati, R., Duryat, D., & Kaskoyo, H. (2018). Penguatan kelembagaan pengelola hutan desa di sekitar Gunung Rajabasa Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 1(3), 80–86.
- Rahmatika, S., et al. (2022). Peningkatan keterampilan pengelola hutan desa dalam mengelola ekowisata alam Puncak Gunung Geurudong. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(5), 4741–4752.

- Sadiyah, S. (2019). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan pendapatan turunan terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(2), 123–135.
- Satria, A., & Yuliani, E. L. (2020). Kelembagaan dan regenerasi petani dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(2), 89–102.
- Siregar, R. (2019). *Manajemen organisasi dan keanggotaan*. Prenadamedia Group.
- Sochib, M. (2018). *Akuntansi keuangan menengah* (Edisi ke-6). Salemba Empat.
- Soekartawi, M. (2003). *Analisis usaha tani: Konsep dan aplikasi* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Soekartawi, S. (2003). *Analisis usahatani: Pendekatan praktis dan aplikasi* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. VII). Alfabeta.
- Sumaryanto, & Siregar, M. (2019). Rantai nilai dan posisi tawar petani dalam sistem agribisnis lokal. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(3), 89–97.
- Suharti, S., Darusman, D., Nugroho, B., & Sundawati, L. (2017). Kelembagaan dan perubahan hak akses masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14(3), 201–215.
- Supriyanto, H., Roni, J., & Bayu, S. (2017). *Hutan kemasyarakatan: Hidup matinya petani miskin*. Konsorsium KpSHK.

- Suratiyah, S. (2006). Analisis pendapatan usahatani padi sawah (*Oryza sativa* L.) di Desa Makroman Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 1(2), 74–81.
- Sutrisno, H. (2021). Dampak penggunaan teknologi terhadap pendapatan petani hutan rakyat. *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 13(1), 45–53.
- Suyanto, S., et al. (2022). Perhutanan sosial sebagai solusi pengurangan deforestasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 14(1), 45–60.
- Syahyuti. (2020). Pentingnya penguatan kapasitas petani dalam pengembangan komoditas lokal. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(3), 211–220.
- Titi, N. (2022). Analisis pendapatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Wardhana, W., & Nurrochmat, D. R. (2020). Kelembagaan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. *Jurnal Kebijakan Kehutanan*, 10(1), 34–48.
- World Health Organization. (2011). *Gender, women and health: What do we mean by 'sex' and 'gender'?*

# LAMPIRAN





## Lampiran 1 Kuesioner

Berdasarkan proposal penelitian dengan judul "**Analisis Pendapatan Masyarakat pada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru** " berikut adalah rancangan kuesioner yang dapat digunakan untuk mendukung pengumpulan data terkait penelitian ini.

### LAMPIRAN KUESIONER

#### **Analisis Pendapatan Masyarakat pada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru**

##### **Petunjuk Pengisian:**

1. Isilah kuesioner ini dengan memberikan tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai atau tuliskan jawaban Anda pada tempat yang disediakan.
2. Semua jawaban bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

##### **Bagian A : Informasi Umum Responden**

1. **Nama** :
2. **Usia** :
  - ☐ < 20 tahun
  - ☐ 20-30 tahun
  - ☐ 31-40 tahun
  - ☐ > 40 tahun
3. **Jenis Kelamin** :
  - ☐ Laki-laki
  - ☐ Perempuan

**4. Tingkat Pendidikan Terakhir:**

- ☐ Tidak Sekolah
- ☐ SD/Sederajat
- ☐ SMP/Sederajat
- ☐ SMA/Sederajat
- ☐ Perguruan Tinggi

**5. Status dalam LPHD :**

- ☐ Anggota Aktif
- ☐ Bukan Anggota

**Bagian B: Informasi Penerimaan**

**1. Rata-rata jumlah produksi HHBK per bulan:**

\_\_\_\_\_ / liter/kg

**2. Harga jual rata-rata per liter aren:**

Rp \_\_\_\_\_ / liter/kg

**Bagian C: Informasi Biaya**

**1. Biaya Tetap (per bulan):**

*(Misalnya: sewa lahan, alat produksi, pajak, dll.)*

Rp \_\_\_\_\_

**2. Biaya Variabel (per bulan):**

*(Misalnya: tenaga kerja, transportasi, bahan tambahan, dll.)*

Rp \_\_\_\_\_

**Bagian D: Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan**

**1. Apakah Anda mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan aren?**

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

**2. Apakah akses ke pasar untuk menjual produk aren sudah memadai?**

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

3. **Apakah Anda menjual produk aren secara langsung ke pasar atau melalui perantara?**

- ☐ Langsung ke pasar
- ☐ Melalui perantara

4. **Apakah Anda menjual produk aren dalam bentuk mentah atau olahan?**

- ☐ Mentah
- ☐ Olahan

5. **Apa tantangan utama dalam pengelolaan aren?**

- ☐ Keterbatasan alat produksi
- ☐ Harga pasar yang fluktuatif
- ☐ Transportasi yang sulit
- ☐ Lainnya: \_\_\_\_\_

6. **Faktor utama apa yang memengaruhi pendapatan Anda? (Bisa memilih lebih dari satu)**

- ☐ Harga pasar
- ☐ Produktivitas lahan
- ☐ Ketersediaan alat modern
- ☐ Dukungan dari LPHD

#### **Bagian D: Persepsi Terhadap LPHD**

1. **Seberapa besar LPHD membantu peningkatan pendapatan Anda?**

- ☐ Sangat Membantu
- ☐ Membantu
- ☐ Tidak Membantu

2. **Saran atau masukan untuk pengelolaan LPHD:**

- .
-

## Lampiran 2 Tabulasi Data Hasil Penelitian

**Tabel 10 Data Identitas Responden LPHD Desa paccekke**

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikn Terakhir	HHBK yang dikelola		
					Kemiri	Aren	Madu
1	Mardihaan	47	Laki-laki	SMA	√		√
2	Mahmudin	42	Laki-laki	SMA	√	√	
3	Bakri H	51	Laki-laki	SMP	√		√
4	Sineng	58	Laki-laki	SMP	√		√
5	Hasse	45	Laki-laki	SMA	√		
6	Jinade	56	Laki-laki	SMP	√	√	
7	Saharuddin	35	Laki-laki	SMA	√		√
8	Bahar Lebbi	55	Laki-laki	SMA	√		√
9	Tangge	58	Laki-laki	SD		√	
10	Laodding	52	Laki-laki	SMP	√		√
11	Lasale	51	Laki-laki	SD	√		√
12	Abd Rauf	52	Laki-laki	S1		√	
13	Masse	46	Laki-laki	SD	√		
14	Basri S	40	Laki-laki	SD	√		√
15	Rais Basiri	40	Laki-laki	SMP	√		

**Tabel 11 Penerimaan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Desa Paccekke Pada Panen 1**

No.	Nama Responden	Jumlah Produk (Kg)	Harga Produk (Rp /Kg)	Penerimaan (Rp /panen)
1	Mardihaan (A1)	125	30.000	3.750.000
2	Mahmudin (A2)	145	30.000	4.350.000
3	Bakri H (A3)	135	30.000	4.050.000
4	Sineng (A4)	130	30.000	3.900.000
5	Hasse (A5)	125	30.000	3.750.000
6	Jinade (A6)	155	30.000	4.650.000
7	Saharuddin (A7)	155	30.000	4.650.000
8	Bahar Lebbi (A8)	145	30.000	4.350.000
9	Tangge (A9)	-	-	-
10	Laodding (A10)	135	30.000	4.050.000
11	Lasale (A11)	180	30.000	5.400.000
12	Abd Rauf (A12)	-	-	-
13	Masse (A13)	170	30.000	5.100.000
14	Basri S (A14)	160	30.000	4.800.000

15	Rais Basiri (A15)	140	30.000	4.200.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 57.000.000</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>Rp. 4.384.615</b>

***Tabel 12 Penerimaan Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Desa Paccekke Pada Panen 2***

No.	Nama Responden	Jumlah Produk (Kg)	Harga Produk (Rp /Kg)	Penerimaan (Rp /panen)
1	Mardihaan (A1)	100	30.000	3.000.000
2	Mahmudin (A2)	120	30.000	3.600.000
3	Bakri H (A3)	110	30.000	3.300.000
4	Sineng (A4)	105	30.000	3.150.000
5	Hasse (A5)	100	30.000	3.000.000
6	Jinade (A6)	130	30.000	3.900.000
7	Saharuddin (A7)	130	30.000	3.900.000
8	Bahar Lebbi (A8)	120	30.000	3.600.000
9	Tangge (A9)	-	-	-
10	Laodding (A10)	110	30.000	3.300.000
11	Lasale (A11)	160	30.000	4.800.000
12	Abd Rauf (A12)	-	-	-
13	Masse (A13)	150	30.000	4.500.000
14	Basri S (A14)	140	30.000	4.200.000
15	Rais Basiri (A15)	120	30.000	3.600.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 47.850.000</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>Rp. 3.680.769</b>

***Tabel 13 Pengeluaran Masyarakat Pengelola Kemiri di LPHD Desa Paccekke***

No .	Nama Responden	Alat dan Bahan	Jumlah Alat/Tahun	Harga	Pengeluaran /Tahun
1	Mardihaan (A1)	Pengupas Kemiri	13	5.000	65.000
		Karung Besar	8	6.500	52.000
		Terpal	3	60.000	180.000
		Bakul	3	55.000	165.000
2	Mahmudin (A2)	Pengupas Kemiri	12	5.000	60.000
		Karung Besar	7	6.500	45.500
		Terpal	2	60.000	120.000



		Bakul	3	55.000	165.000
3	Bakri H (A3)	Pengupas Kemiri	10	5.000	50.000
		Karung Besar	10	6.500	65.000
		Terpal	4	60.000	240.000
		Bakul	2	55.000	110.000
4	Sineng (A4)	Pengupas Kemiri	17	5.000	85.000
		Karung Besar	9	6.500	58.500
		Terpal	2	60.000	120.000
		Bakul	2	55.000	110.000
5	Hasse (A5)	Pengupas Kemiri	14	5.000	70.000
		Karung Besar	7	6.500	45.500
		Terpal	2	60.000	120.000
		Bakul	3	55.000	165.000
6	Jinade (A6)	Pengupas Kemiri	12	5.000	60.000
		Karung Besar	9	6.500	58.500
		Terpal	2	60.000	120.000
		Bakul	2	55.000	110.000
7	Saharuddin (A7)	Pengupas Kemiri	14	5.000	70.000
		Karung Besar	10	6.500	65.000
		Terpal	3	60.000	180.000
		Bakul	3	55.000	165.000
8	Bahar Lebbi (A8)	Pengupas Kemiri	10	5.000	50.000
		Karung Besar	8	6.500	52.000
		Terpal	2	60.000	120.000
		Bakul	3	55.000	165.000
9	Tangge (A9)	Pengupas Kemiri	-	-	-
		Karung Besar	-	-	-
		Terpal	-	-	-
		Bakul	-	-	-
10	Laodding (A10)	Pengupas Kemiri	10	5.000	50.000
		Karung Besar	10	6.500	65.000
		Terpal	3	60.000	180.000
		Bakul	3	55.000	165.000
11	Lasale (A11)	Pengupas Kemiri	15	5.000	75.000
		Karung Besar	10	6.500	65.000
		Terpal	2	60.000	120.000

		Bakul	4	55.000	220.000
12	Abd Rauf (A12)	Pengupas Kemiri	-	-	-
		Karung Besar	-	-	-
		Terpal	-	-	-
		Bakul	-	-	-
13	Masse (A13)	Pengupas Kemiri	15	5.000	75.000
		Karung Besar	12	6.500	780.000
		Terpal	2	60.000	120.000
		Bakul	3	55.000	165.000
14	Basri S (A14)	Pengupas Kemiri	10	5.000	50.000
		Karung Besar	10	6.500	65.000
		Terpal	2	60.000	120.000
		Bakul	2	55.000	110.000
15	Rais Basiri (A15)	Pengupas Kemiri	13	5.000	65.000
		Karung Besar	7	6.500	45.500
		Terpal	2	60.000	120.000
		Bakul	2	55.000	110.000
Jumlah					Rp. 6.599.000
Rata-Rata					Rp. 507.615

**Tabel 14 Penerimaan Masyarakat Pengelola Aren di LPHD Desa Paccekke Pada Panen 1**

No.	Nama Responden	Jumlah Produk (Kg)	Harga Produk (Rp /Kg)	Penerimaan (Rp / panen)
1	Mardihaan (A1)	-	-	-
2	Mahmudin (A2)	46	28.000	1.288.000
3	Bakri H (A3)	-	-	-
4	Sineng (A4)	-	-	-
5	Hasse (A5)	-	-	-
6	Jinade (A6)	35	28.000	980.000
7	Saharuddin (A7)	-	-	-
8	Bahar Lebby (A8)	-	-	-
9	Tangge (A9)	44	28.000	1.232.000
10	Laodding (A10)	-	-	-
11	Lasale (A11)	-	-	-
12	Abd Rauf (A12)	50	28.000	1.400.000

13	Masse (A13)	-	-	-
14	Basri S (A14)	-	-	-
15	Rais Basiri (A15)	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 4.900.000</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>Rp. 1.225.000</b>

***Tabel 15 Penerimaan Masyarakat Pengelola Aren di LPHD Desa Paccekke Pada Panen 2***

<b>No.</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Jumlah Produk (Kg)</b>	<b>Harga Produk (Rp /Kg)</b>	<b>Penerimaan (Rp / panen)</b>
1	Mardihaan (A1)	-	-	-
2	Mahmudin (A2)	50	28.000	1.400.000
3	Bakri H (A3)	-	-	-
4	Sineng (A4)	-	-	-
5	Hasse (A5)	-	-	-
6	Jinade (A6)	41	28.000	1.148.000
7	Saharuddin (A7)	-	-	-
8	Bahar Lebbi (A8)	-	-	-
9	Tangge (A9)	49	28.000	1.372.000
10	Laodding (A10)	-	-	-
11	Lasale (A11)	-	-	-
12	Abd Rauf (A12)	55	28.000	1.540.000
13	Masse (A13)	-	-	-
14	Basri S (A14)	-	-	-
15	Rais Basiri (A15)	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 5.460.000</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>Rp. 1.365.000</b>

***Tabel 16 Penerimaan Masyarakat Pengelola Aren di LPHD Desa Paccekke Pada Panen 3***

<b>No.</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Jumlah Produk (Kg)</b>	<b>Harga Produk (Rp /Kg)</b>	<b>Penerimaan (Rp / panen)</b>
1	Mardihaan (A1)	-	-	-
2	Mahmudin (A2)	40	28.000	1.120.000

3	Bakri H (A3)	-	-	-
4	Sineng (A4)	-	-	-
5	Hasse (A5)	-	-	-
6	Jinade (A6)	30	28.000	840.000
7	Saharuddin (A7)	-	-	-
8	Bahar Lebbi (A8)	-	-	-
9	Tangge (A9)	40	28.000	1.120.000
10	Laodding (A10)	-	-	-
11	Lasale (A11)	-	-	-
12	Abd Rauf (A12)	47	28.000	1.316.000
13	Masse (A13)	-	-	-
14	Basri S (A14)	-	-	-
15	Rais Basiri (A15)	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 4.396.000</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>Rp. 1.099.000</b>

**Tabel 17 Pengeluaran Masyarakat Pengelola Aren di LPHD Desa Paccekke**

No .	Nama Responden	Alat dan Bahan	Jumlah Alat/Tahun	Harga	Pengeluaran /Tahun
1	Mardihaan (A1)	Tungku	-	-	-
		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-
2	Mahmudin (A2)	Tungku	2	40.000	80.000
		Wajan	5	75.000	375.000
		Alat Cetak	15	12.500	187.500
		Sendok Kayu	5	7.500	37.500
3	Bakri H (A3)	Tungku	-	-	-
		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-
4	Sineng (A4)	Tungku	-	-	-
		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-
5	Hasse (A5)	Tungku	-	-	-

		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-
6	Jinade (A6)	Tungku	3	40.000	120.000
		Wajan	4	75.000	300.000
		Alat Cetak	15	12.500	187.500
		Sendok Kayu	8	7.500	60.000
7	Saharuddin (A7)	Tungku	-	-	-
		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-
8	Bahar Lebbi (A8)	Tungku	-	-	-
		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-
9	Tangge (A9)	Tungku	2	40.000	80.000
		Wajan	5	75.000	375.000
		Alat Cetak	16	12.500	200.000
		Sendok Kayu	8	7.500	60.000
10	Laodding (A10)	Tungku	-	-	-
		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-
11	Lasale (A11)	Tungku	-	-	-
		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-
12	Abd Rauf (A12)	Tungku	2	40.000	80.000
		Wajan	6	75.000	450.000
		Alat Cetak	17	12.500	212.500
		Sendok Kayu	10	7.500	75.000
13	Masse (A13)	Tungku	-	-	-
		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-
14	Basri S (A14)	Tungku	-	-	-
		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-
15	Rais Basiri (A15)	Tungku	-	-	-
		Wajan	-	-	-
		Alat Cetak	-	-	-
		Sendok Kayu	-	-	-



<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.880.000</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>Rp. 720.000</b>

***Tabel 18 Penerimaan Masyarakat Pengelola Madu di LPHD Desa Paccekke  
Pada panen 1***

<b>No.</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Jumlah Produk (Botol)</b>	<b>Harga Produk (Rp /Botol)</b>	<b>Penerimaan (Rp /panen)</b>
1	Mardihaan (A1)	22	120.000	2.640.000
2	Mahmudin (A2)	-	-	-
3	Bakri H (A3)	23	120.000	2.760.000
4	Sineng (A4)	21	120.000	2.520.000
5	Hasse (A5)	-	-	-
6	Jinade (A6)	-	-	-
7	Saharuddin (A7)	20	120.000	2.400.000
8	Bahar Lebbi (A8)	21	120.000	2.520.000
9	Tangge (A9)	-	-	-
10	Laodding (A10)	20	120.000	2.400.000
11	Lasale (A11)	22	120.000	2.640.000
12	Abd Rauf (A12)	-	-	-
13	Masse (A13)	-	-	-
14	Basri S (A14)	22	120.000	2.640.000
15	Rais Basiri (A15)	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 20.520.000</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>Rp. 2.565.000</b>

***Tabel 19 Penerimaan Masyarakat Pengelola Madu di LPHD Desa Paccekke  
Pada panen 2***

<b>No.</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Jumlah Produk (Botol)</b>	<b>Harga Produk (Rp /Botol)</b>	<b>Penerimaan (Rp /panen)</b>
1	Mardihaan (A1)	27	120.000	3.240.000
2	Mahmudin (A2)	-	-	-

3	Bakri H (A3)	26	120.000	3.120.000
4	Sineng (A4)	24	120.000	2.880.000
5	Hasse (A5)	-	-	-
6	Jinade (A6)	-	-	-
7	Saharuddin (A7)	23	120.000	2.760.000
8	Bahar Lebbi (A8)	25	120.000	3.000.000
9	Tangge (A9)	-	-	-
10	Laodding (A10)	23	120.000	2.760.000
11	Lasale (A11)	25	120.000	3.000.000
12	Abd Rauf (A12)	-	-	-
13	Masse (A13)	-	-	-
14	Basri S (A14)	26	120.000	3.120.000
15	Rais Basiri (A15)	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 23.880.000</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>Rp. 2.985.000</b>

***Tabel 20 Penerimaan Masyarakat Pengelola Madu di LPHD Desa Paccekke Pada panen 3***

<b>No.</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Jumlah Produk (Botol)</b>	<b>Harga Produk (Rp /Botol)</b>	<b>Penerimaan (Rp /panen)</b>
1	Mardihaan (A1)	19	120.000	2.280.000
2	Mahmudin (A2)	-	-	-
3	Bakri H (A3)	19	120.000	2.280.000
4	Sineng (A4)	18	120.000	2.160.000
5	Hasse (A5)	-	-	-
6	Jinade (A6)	-	-	-
7	Saharuddin (A7)	18	120.000	2.160.000
8	Bahar Lebbi (A8)	18	120.000	2.160.000
9	Tangge (A9)	-	-	-
10	Laodding (A10)	17	120.000	2.040.000
11	Lasale (A11)	19	120.000	2.280.000

12	Abd Rauf (A12)	-	-	-
13	Masse (A13)	-	-	-
14	Basri S (A14)	18	120.000	2.160.000
15	Rais Basiri (A15)	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 17.520.000</b>
<b>Rata - Rata</b>				<b>Rp. 2.190.000</b>

**Tabel 21 Pengeluaran Masyarakat Pengelola Madu di LPHD Desa Paccekke**

No .	Nama Responden	Alat dan Bahan	Jumlah Alat/Tahun	Harga	Pengeluaran /Tahun
1	Mardihan (A1)	Palu	2	25.000	50.000
		Papan	6	35.000	210.000
		Botol (750 ml)	48	30.000	1.440.000
		Saringan	5	20.000	100.000
2	Mahmudin (A2)	Palu	-	-	-
		Papan	-	-	-
		Botol (750 ml)	-	-	-
		Saringan	-	-	-
3	Bakri H (A3)	Palu	2	25.000	50.000
		Papan	4	35.000	140.000
		Botol (750 ml)	48	30.000	1.440.000
		Saringan	4	20.000	80.000
4	Sineng (A4)	Palu	3	25.000	75.000
		Papan	4	35.000	140.000
		Botol (750 ml)	43	30.000	1.290.000
		Saringan	3	20.000	60.000
5	Hasse (A5)	Palu	-	-	-
		Papan	-	-	-
		Botol (750 ml)	-	-	-
		Saringan	-	-	-
6	Jinade (A6)	Palu	-	-	-
		Papan	-	-	-
		Botol (750 ml)	-	-	-
		Saringan	-	-	-
7	Saharuddin (A7)	Palu	3	25.000	75.000
		Papan	5	35.000	175.000
		Botol (750 ml)	41	30.000	1.230.000
		Saringan	4	20.000	80.000
8		Palu	2	25.000	50.000

	Bahar Lebbi (A8)	Papan	4	35.000	140.000
		Botol (750 ml)	44	30.000	1.320.000
		Saringan	3	20.000	60.000
9	Tangge (A9)	Palu	-	-	-
		Papan	-	-	-
		Botol (750 ml)	-	-	-
		Saringan	-	-	-
10	Laodding (A10)	Palu	2	25.000	50.000
		Papan	7	35.000	245.000
		Botol (750 ml)	40	30.000	1.200.000
		Saringan	5	20.000	100.000
11	Lasale (A11)	Palu	1	25.000	25.000
		Papan	3	35.000	105.000
		Botol (750 ml)	46	30.000	1.380.000
		Saringan	4	20.000	80.000
12	Abd Rauf (A12)	Palu	-	-	-
		Papan	-	-	-
		Botol (750 ml)	-	-	-
		Saringan	-	-	-
13	Masse (A13)	Palu	-	-	-
		Papan	-	-	-
		Botol (750 ml)	-	-	-
		Saringan	-	-	-
14	Basri S (A14)	Palu	3	25.000	75.000
		Papan	7	35.000	245.000
		Botol (750 ml)	46	30.000	1.380.000
		Saringan	4	20.000	80.000
15	Rais Basiri (A15)	Palu	-	-	-
		Papan	-	-	-
		Botol (750 ml)	-	-	-
		Saringan	-	-	-
Jumlah					Rp. 13.170.000
Rata-Rata					Rp. 1.646.250



### Lampiran 3 Dokumentasi



*Gambar 4 Wawancara Responden*



*Gambar 5 Wawancara Responden*





*Gambar 6 Wawancara Responden*



*Gambar 7 Wawancara Responden*



*Gambar 8 Wawancara Responden*

#### Lampiran 4 SK LPHD Desa Paccekke





24 Mei 2017, areal yang direkomendasi seluas ± 102 (seratus dua) hektar yang seluruhnya berada pada kawasan Hutan Lindung (HL);

d. bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf (c), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MenLHK/ Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang telah diajukan Bupati/Walikota yang sudah diverifikasi atau telah terbit Penetapan Areal Kerjanya sebelum ditetapkan peraturan ini, Menteri menerbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa;

e. bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MenLHK/ Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Pacekke seluas ± 102 (seratus dua) hektar, berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) di Desa Pacekke Kecamatan Soppeng Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46464) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48181);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ Menlhk/ Setjen/ UTLQ/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. \*

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA PACEKKE SELUAS  $\pm 102$  (SERATUS DUA) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA PACEKKE KECAMATAN SOPPENG KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU

Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Pacekke di wilayah administrasi Desa Pacekke Kecamatan Soppeng Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan seluas  $\pm 102$  (seratus dua) Hektar, berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) dengan susunan pengurus sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEDUA

Letak dan batas Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amat KESATU adalah sebagaimana tergambar pada lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amat KESATU dengan ketentuan:

1. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diwariskan;
2. Hak Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
3. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang dipindah tangankan;
4. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
5. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;

9. Hak...

6. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
7. Dilarang menanam sawit di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa.

KEEMPAT

Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana Amur KESATU, meliputi:

1. Usaha pemanfaatan kawasan;
2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

KELIMA

Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Parekke berhak:

1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amur KEEMPAT sesuai dengan kondisi lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Desa;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Desa serta penyelesaian konflik;
6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan peningkatan rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KEENAM

Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Parekke berkewajiban:

1. menjaga

1. menjaga arcahnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
2. memberi tanda batas areal kerjanya;
3. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD);
4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi Hak Pengelolaan Hutan Desa;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa;
6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
7. membayar provisi sumber daya hutan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan perlindungan hutan.

KETUJUH

Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KEDELAPAN

Apabila pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa Pacakke melanggar hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA dan KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perhutanan Sosial.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2017

Salinan sesuai dengan aslinya : An MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
Kepala Bagian Hukum dan : KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
Kerjasama Teknik : DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
Sekretariat Direktorat Jenderal : SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,  
Perhutanan Sosial dan  
Kemitraan Lingkungan. Ttd

R. Luhur Kusumo, SH., M.Si

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
11. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung;
12. Gubernur Sulawesi Selatan;
13. Bupati Barru;
14. Kepala Balai Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan Wil. Sulawesi;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Kepala Satuan Pengelolaan Hutan Lindung Kab. Barru;
17. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Pacekke



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN  
DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA PACEKKE SELUAS ±  
102 (SERATUS DUA) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA  
PACEKKE KECAMATAN SOPPENG KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI  
SELATAN

NOMOR :SK.3495/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2017

TANGGAL : 12 Juni 2017

SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA PACEKKE  
DI DESA PACEKKE KECAMATAN SOPPENG KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua Umum

Nanda ✓

Sekretaris

Mardihan ✓

Bendahara

Asri ✓

Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya  
Manusia

Koordinator

Chandana ✓

Anggota

1. Mahmuddin ✓

11. Ladin ✓

2. Bakri H. ✓

12. Lasming ✓

3. Sineng Dewi ✓

13. Yuh ✓

4. Hasse ✓

14. Ladi ✓

5. Jinade ✓

15. M. Asikin ✓

6. Saharuddin ✓

16. Bahar Lebhi ✓

7. Basri ✓

17. Tingge ✓

8. Abd. Hamid ✓

18. Lachding ✓

9. Mustamin ✓

19. Bahar Laming ✓

10. Zainal ✓

20. Syalandin ✓

Seksi Pemanfaatan Hutan & Pengembangan Usaha

Koordinator

Armin ✓

Anggota

1. Harung ✓

11. Dahan ✓

2. Bahar Sunu ✓

12. Tandalo ✓

3. Muhtar ✓

13. Jumrah Laros ✓

4. Lasale ✓

14. Ahmad Lami ✓

5. Riber ✓

15. Masing ✓

6. Tamrin T. ✓

16. Linsale ✓

7. Oddinge ✓

17. Abd. Raul ✓

7. Oddinge ✓



8. Samsuddin
9. Basri D.
10. Abd. Hakim

18. Abd. Hamid
19. Ambau
20. Irtmansa...

Seksi Perlindungan & Pengawasan

Koordinator

Anggota

1. Naing
2. Bakri Halide
3. Bahri
4. Masse
5. Basri S.
6. Bahtiar
7. Tansi
8. Lawali
9. Arimin
10. Mansur

Patang

11. Ham
12. Lagu
13. Rus Basri
14. Yunus
15. Bahri
16. Bahodding
17. Lasape
18. Syarifuddin
19. Ladeng
20. Kistan



AN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN,  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd

HADI DARYANTO

NIP 19571020 198203 1 002

## Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: 1829/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Barru
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5907/05/C.4-VIII/I/1446/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: YUMIL ALFUADI AGNUR
Nomor Pokok	: 105851100920
Program Studi	: Kebutanan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Siti Alevudin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS PENDAPATAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 Januari s/d 24 Maret 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 22 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Paringgal.

## Lampiran 6 Surat Rekomendasi Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN BARRU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pelayaran Publik Miniga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Umar  
https://dpmptsp.kab.barru.go.id | e-mail : dpmptsp.kab.barru@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 30 Januari 2025

Nomor : 022/IP/DPMPTSP/1/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. 1. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan  
Ajatappareng Kab. Barru  
2. Kepala Desa Paccekke Kec. Soppeng  
Raja  
di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Sulsel Nomor : 1829/S.01/PTSP/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal tersebut di atas, maka  
Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Younil Alfrudi Agnur  
Nomor Pokok : 10951100928  
Program Studi : Kehutanan  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa  
Alamat : BTN Permata Sullang Raya F 4/5 Kel. Lallang Kec. Biringkanaya  
Kota Makassar

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah Kantor Sandera yang  
berlangsung mulai tanggal 30 Januari 2025, sd 21 Maret 2025, dalam rangka penyusunan Skrripsi,  
dengan judul :

#### ANALISIS PENDAPATAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RAJA KABUPATEN BARRU

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada pangsinya kami menghujat kegiatan dimaksud  
dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala  
SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan  
setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mematuhi semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat  
setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin  
ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan ES-E



Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.  
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas,



**LEMBUSAN :** disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeditbangda Kab. Barru;
3. Camat Soppeng Riga Kab. Barru;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar;
5. Mahasiswa Yang bersangkutan.





## Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

*Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Youmil Alfendi Agnur

Nim : 105951100920

Program Studi : Kehutanan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	25%	25 %
3	Bab 3	8%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 09 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411) 866972, 881 593, fax (0411) 865 588  
Website: [www.library.unismuh.ac.id](http://www.library.unismuh.ac.id)  
E-mail : [perpustakaan@unismuh.ac.id](mailto:perpustakaan@unismuh.ac.id)



## Lampiran 8 Hasil Turnitin

BAB I Youmil Alfuaadi Agnur 105951100920

ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX

8% INTERNET SOURCES

9% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Source	Similarity Index
1. <a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	4%
2. <a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	3%
3. Firdaus A.Y., "Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial", Center for International Forestry Research (CIFOR) and World Agroforestry Centre (ICRAF), 2018 Publication	2%
4. <a href="http://johannessimatupang.wordpress.com">johannessimatupang.wordpress.com</a> Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches = 1%

CS Dipindai dengan CamScanner

## BAB II Youmil Alfuali Agnur 105951100920

### ORIGINALITY REPORT

**25%** SIMILARITY INDEX  
**21%** INTERNET SOURCES  
**10%** PUBLICATIONS  
**%** STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

- 1** [digilibadmin.unismuh.surabaya.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.surabaya.ac.id)  
Internet Source 11%
- 2** [stiealwashliyahsibolga.ac.id](http://stiealwashliyahsibolga.ac.id)  
Internet Source 5%
- 3** Syifa Saputra, Reza Fahmi, Ajmir Akmal, Sri Wahyuni, Sayed Ahmad Zaki Yamani, Nuraida Nuraida, Uhti Nuzul Qhinanti Lubis, "PENGUATAN KETERAMPILAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA UNTUK KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN EKOWISATA", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2023  
Publication 3%
- 4** [www.scribd.com](http://www.scribd.com)  
Internet Source 3%
- 5** Karlina Yullana, Wike Pertiwi, July Yuliawati, "ANALISIS ARUS KAS SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 PADA BADAN PENGELOA TAMANSARI MAHOGANY APARTEMEN PERIODE 2019-2023", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024  
Publication 2%

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches = 21%

### BAB III Youmil Alfuadi Agnur 105951100920

#### ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES



0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

1

jurnal.untad.ac.id  
Internet Source

8%

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



Dipindai dengan CamScanner

BAB IV Youmil Alfuali Agnur 105951100920

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



digilibaamin.unismuh.ac.id  
Internet Source

10%

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches = 2%



Dipindai dengan CamScanner



BAB V Youmil Alfuadi Agnur 105951100920

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

biologiarraniry15.wordpress.com  
Internet Source

2%

2

repo.darmajaya.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes ☐

Exclude bibliography ☐

Exclude matches ☐



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Youmil Alfuadi Agnur** Lahir di Makassar Tanggal 25 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ayahanda Agustan Rasi dan Ibunda Nurliah. Penulis mengikuti pendidikan formal pada tahun 2006 di TK RAUDHATUL ATHFAL RABIATUL ADAWIYAH

MAKASSAR dan lulus pada tahun 2007. Masuk SDN PAJJAANG tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 36 MAKASSAR dan selesai pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMA 22 MAKASSAR dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Strata 1 (S1) dan lulus pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, dan pada tahun 2025 akan menyelesaikan studinya dengan judul skripsi “Analisis Pendapatan Masyarakat Pada Kawasan Hutan Lidung Di Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”

Pengalaman organisasi: Anggota Bidang Himpunan Mahasiswa Kehutanan (HMK-FP) periode 2022-2023.